



**DRAFT**

# **RENCANA STRATEGIS**

**TAHUN 2025--2029**

**BALAI BAHASA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEMENDIKDAS MEN  
**RAMAH**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
**BALAI BAHASA**  
**PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070

Laman balaibahasadiy.kemendikdasmen.go.id; Posel balaibahasadiy@kemendikdasmen.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 1812/I5.6/PR.05.00/2025**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS**  
**BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2025—2029**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025—2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tentang Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025—2029;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);  
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);  
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);  
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025—2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 764).

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:** KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025—2029.
- KESATU :** Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2025—2029.
- KEDUA :** Menetapkan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025—2029, yang selanjutnya disebut Renstra Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2025—2029, merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA :** Renstra Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2025—2029 dipergunakan sebagai pedoman untuk penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 29 Oktober 2025  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Anang Santosa  
NIP 196804281998021001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan. Dokumen ini menjadi peta jalan bagi kami dalam mengemban amanat sebagai garda terdepan pelestarian dan pengembangan kebahasaan dan kesastraan di tanah Jawa yang mempertahankan keistimewaannya.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya dikenal sebagai *Kota Pelajar* dan *Pusat Budaya Jawa*, tetapi juga sebagai laboratorium kebhinekaan yang memadukan tradisi dan modernitas. Di tengah arus globalisasi, tantangan untuk mempertahankan kedaulatan bahasa—terutama bahasa Jawa sebagai identitas budaya dan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa—semakin kompleks. Fenomena penurunan penggunaan bahasa Jawa di kalangan generasi muda, dominasi bahasa asing di ruang digital, serta kebutuhan akan literasi berbasis kearifan lokal menjadi pekerjaan rumah yang mendesak.

Renstra ini disusun dengan memperhatikan *karakteristik khas DIY*.

1. Kebijakan keistimewaan yang memberikan ruang bagi perlindungan bahasa daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa. Kebijakan ini pelaksanaannya diatur melalui Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021.
2. Jaringan pendidikan dan kebudayaan yang kuat, meliputi 113 perguruan tinggi, ratusan sanggar seni, puluhan komunitas literasi yang tersebar di lima kabupaten/kota, dan ribuan karya bahasa dan sastra yang dipublikasikan setiap tahun.
3. Warisan budaya lisan dan tulis (naskah kuna, tembang, wayang) yang menjadi sumber pembelajaran tak ternilai. Warisan budaya itu mengandung nilai sejarah, etika, dan kearifan lokal yang membentuk identitas kebudayaan bangsa Indonesia.

Kami menyadari bahwa keberhasilan Renstra ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas arahan kebijakan nasional;

2. Pemerintah Provinsi DIY (Gubernur, DPRD DIY, serta SKPD terkait) yang telah memfasilitasi penyusunan dokumen ini;
3. Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY (Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul) sebagai mitra strategis di lapangan;
4. perguruan tinggi, sanggar seni, komunitas sastra dan literasi, serta insan pers yang telah berkontribusi dalam memberikan masukan; dan
5. seluruh pegawai Balai Bahasa Provinsi DIY yang telah bekerja keras dalam merumuskan rencana ini.

Akhirnya, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal implementasi Renstra ini. Semoga dokumen ini menjadi pijakan kokoh bagi Balai Bahasa Provinsi DIY dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas berbahasa, bangga akan identitas budayanya, serta siap berkontribusi di kancah global.

Yogyakarta, Oktober 2025

Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY,



Anang Santosa

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| SK KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  |    |
| KATA PENGANTAR .....   | i  |
| DAFTAR ISI .....   | ii |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1  |
| 1.1 Kondisi Umum .....   | 2  |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan .....   | 7  |
| BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN .....  | 9  |
| 2.1 Visi .....   | 9  |
| 2.2 Misi .....   | 10 |
| 2.3 Tujuan .....   | 11 |
| 2.4 Sasaran Strategis .....  | 13 |
| 2.5 Sasaran Program .....  | 14 |
| 2.6 Sasaran Kegiatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa .....   | 16 |
| 2.7 Sasaran Kegiatan Balai Bahasa Provinsi DIY .....   | 16 |
| 2.8 Manajemen Risiko Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan Balai Bahasa<br>Provinsi DIY .....                        | 20 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA<br>KELEMBAGAAN .....                               | 22 |
| 3.1 Arah Kebijakan .....   | 22 |
| 3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....   | 22 |
| 3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikdasmen .....   | 23 |
| 3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan<br>Pembinaan Bahasa .....                                   | 25 |
| 3.1.3.1 Arah Kebijakan BPP Bahasa .....  | 25 |
| 3.1.3.2 Strategi Pelaksanaan Program .....   | 34 |
| 3.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Bahasa Provinsi DIY<br>3.1.4.1 Arah Kebijakan Balai Bahasa Provinsi DIY..... | 37 |
| 3.1.4.2 Strategi Pelaksanaan Program Balai Bahasa Provinsi DIY.....  | 38 |
| 3.2 Kerangka Regulasi .....  | 40 |
| 3.3 Kerangka Kelembagaan .....   | 42 |
| 3.3.1 Struktur Organisasi .....  | 43 |
| 3.3.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia .....  | 43 |
| 3.3.3 Proyeksi Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana .....  | 44 |
| 3.3.4 Proyeksi Pengembangan Pemerintahan Digital (Sistem Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik)/SPBE .....             | 45 |

|  |    |
|--|----|
| 3.3.5 Reformasi Birokrasi .....                    | 47 |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ..... | 48 |
| 4.1 Target Kinerja .....                           | 48 |
| 4.2. Kerangka Pendanaan .....                      | 52 |
| BAB V PENUTUP .....                                | 53 |
| LAMPIRAN .....                                     | 54 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara multibahasa dengan satu bahasa nasional (bahasa Indonesia), 718 bahasa daerah, dan puluhan bahasa asing. Keberagaman bahasa tersebut merupakan kekayaan dan modal sosial yang tak ternilai harganya bagi bangsa berpenduduk lebih dari 280 juta jiwa. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), jumlah penduduk DIY pada tahun 2025 mencapai 4.179.333 jiwa. Pada umumnya, mereka adalah penutur bahasa Indonesia. Di antaranya, sekitar 93,4% penduduk DIY juga merupakan penutur aktif bahasa Jawa. Artinya, sekitar 3,9 juta jiwa menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu maupun bahasa komunikasi sehari-hari. Di sisi lain, sekitar 20–25% penduduk yang tinggal di DIY adalah pendatang, terutama mahasiswa dan pekerja dari provinsi lain. Kota Yogyakarta dan Sleman menjadi wilayah dengan tingkat arus migrasi tertinggi karena padatnya institusi pendidikan—terdapat 113 perguruan tinggi di wilayah ini. Selain itu, jumlah warga negara asing (WNA) yang menetap untuk studi dan riset juga terus meningkat setiap tahun. Heterogenitas ini memberikan pengaruh besar pada dinamika penggunaan bahasa (termasuk sastra dan aksara). Oleh karena itu, perlindungan bahasa daerah menjadi tantangan. Alih kode, campur kode, dan adaptasi terhadap bahasa Indonesia dan bahasa asing menyebabkan generasi muda sedikit berjarak dengan bahasa daerah, terutama bahasa Jawa yang memiliki berbagai macam ragam (*ngoko--kromo*). Inovasi pendidikan bilingual dan program revitalisasi bahasa daerah berperan dalam menjaga keberlanjutan penggunaan bahasa daerah pada masyarakat multietnis di DIY.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) keberagaman ini tecermin dalam

- penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan instrumen pendidikan;
- penggunaan bahasa Jawa digunakan sebagian besar penduduk di DIY dan menjadi muatan lokal wajib di sekolah dan madrasah di DIY; dan
- penggunaan bahasa asing (Inggris, Jepang, Mandarin) sebagai penunjang pariwisata dan pendidikan tinggi.

Keberagaman ini menyimpan potensi persatuan dan inovasi, sekaligus tantangan keterpecahan akibat gesekan antarbahasa dan dominasi budaya asing. Di DIY, tantangan ini krusial mengingat statusnya sebagai pusat budaya Jawa dan kota pelajar dengan 113 perguruan tinggi.

Untuk menjawab tantangan di atas, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Balai Bahasa Yogyakarta) menyusun Renstra Tahun 2025—2029. Renstra ini disusun

sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dalam lingkup kebijakan pembangunan nasional bidang kebahasaan dan kesastraan. Penyusunan dokumen ini memperhatikan arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

## 1.1 Kondisi Umum

### 1.1.1 Evaluasi Capaian Kinerja 2020–2024

Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendukung program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui program Merdeka Belajar dengan turut serta melaksanakan Episode Ke-17 Revitalisasi Bahasa Daerah dan Episode Ke-23 Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia. Selain itu, Balai Bahasa Provinsi DIY juga mendukung program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan, perlindungan bahasa dan sastra daerah, dan internasionalisasi bahasa Indonesia. Dukungan itu berupa tujuh kegiatan dengan sembilan indikator kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel  
Capaian Balai Bahasa Provinsi DIY  
Tahun 2020--2024

| No | Sasaran Kinerja   | Indikator Kinerja |   | Capaian 2020--2024 |                   |
|----|---|-------------------|---|--------------------|-------------------|
|    |   |                   |   | Jumlah             | Satuan            |
| 1  | Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra                                   | 1.1               | Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra  | 9                  | Produk            |
| 2  | Meningkatnya partisipasi asyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan | 2.1               | Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan | 17.207             | Orang             |
| 3  | Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan                          | 3.1               | Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya                                      | 655                | Lembaga           |
|    |   | 3.2               | Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina                                      | 16                 | Lembaga           |
| 4  | Meningkatnya Jumlah Pemelajar BIPA  | 4.1               | Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing                                  | 1.423/<br>16       | Orang/<br>Lembaga |
| 5  | Tersedianya produk diplomasi bahasa   | 5.1               | Jumlah produk penerjemahan  | 265                | Produk            |
| 6  | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah     | 6.1               | Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah                               | 3.690              | Orang             |
| 7  | Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa DIY   | 7.1               | Predikat Sakip Satker minimal BB  | A                  | Predikat          |
|    |   | 7.2               | Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL minimal 91                             | 88,5               | Nilai             |

Selain capaian di atas, berikut ini uraian capaian kegiatan Balai Bahasa Provinsi DIY yang mendukung tiga program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dari perspektif sasaran kegiatan yang tertuang dalam target dan capaian tiap indikator kinerja program.

Sasaran program pertama Badan Bahasa ialah *Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan* yang didukung melalui sasaran kinerja kegiatan Balai Bahasa Provinsi DIY berupa (a) Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia, (b) Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra, (c) Jumlah Komunitas Penggerak Literasi yang Terbina, (d) Jumlah Produk Penerjemahan, (e) Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya, dan (f) Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya. Berbagai aktivitas yang mendukung sasaran program pertama ialah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Inventarisasi Kosakata untuk Pemerayaan KBBI
2. Penyusunan Kamus Bergambar Bidang Peralatan Tradisional, Kuliner Tradisional, dan Permainan Tradisional
3. Penyusunan Kamus Digital (Kamus Bahasa Jawa-Indonesia)
4. Peningkatan Kemahiran Berbahasa
5. Peningkatan Apresiasi Sastra (Musikalisasi Puisi)
6. Peningkatan Apresiasi Sastra (Penghargaan Bahasa dan Sastra)
7. Pembinaan Masyarakat (Bulan Bahasa)
8. Pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka
9. Pemilihan Duta Bahasa Literasi Penggerak
10. Pembinaan Literasi Generasi Muda
11. Krida Duta Bahasa untuk Aktivistis Kampus dan Sekolah
12. Pembinaan Penggunaan Bahasa di Lembaga Pemerintah, Swasta, dan Pendidikan

### **Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan**



- **265** produk penerjemahan
- **12.678** peuji kemahiran berbahasa Indonesia
- **4.529** penutur bahasa terbina
- **9 produk** (5 Produk Pemerayaan Kosakata, 3 Kamus Bergambar, dan 1 Kamus Digital)
- **655** lembaga terfasilitasi layanan profesional kebahasaan dan kesastraan/jumlah lembaga terbina pengguna bahasa
- **16** jumlah komunitas penggerak literasi

Sasaran program kedua Badan Bahasa adalah *Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah* yang didukung melalui sasaran kinerja kegiatan Balai Bahasa Provinsi DIY berupa (a) Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah dan (b) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelindungan Bahasa dan Sastra daerah. Beberapa aktivitas yang mendukung sasaran program kedua, antara lain

1. pelaksanaan rangkaian kegiatan revitalisasi bahasa daerah (RBD), meliputi penyusunan modul, koordinasi antarinstansi, bimbingan teknis guru utama, pengimbasan, supervisi, dan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) dan
2. pemberdayaan penutur jati pelaku sastra.

### Revitalisasi Bahasa Daerah

- **5** kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan revitalisasi bahasa daerah
- **1** bahasa daerah/dialek direvitalisasi
- **3.690** orang terlibat dalam revitalisasi bahasa daerah
- **2.370** partisipan FTBI



Sasaran program ketiga adalah *Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional* yang didukung melalui sasaran kinerja kegiatan Balai Bahasa Provinsi DIY berupa meningkatnya jumlah pemelajar BIPA dan pembinaan lembaga Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Aktivitas yang mendukung sasaran program ketiga, yaitu fasilitasi penyelenggaraan program bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA).

### Internasionalisasi Bahasa Indonesia



- **23** lembaga BIPA terfasilitasi di Daerah Istimewa Yogyakarta
- **1.423** orang pemelajar BIPA

Sasaran program keempat adalah *Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Berkualitas* yang didukung melalui sasaran kinerja program berupa Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta minimal BB dan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL minimal 91. Aktivitas yang mendukung sasaran program keempat, antara lain

1. pelayanan manajemen kinerja internal (perencanaan, evaluasi, keuangan, kearsipan);
2. pelayanan manajemen SDM internal;
3. pelayanan sarana dan prasarana internal; dan
4. pelayanan dukungan manajemen internal (BMN, humas, protokoler, dan lain-lain).

### 1.1.2 Aspirasi Masyarakat

Balai Bahasa Provinsi DIY menghimpun aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan melalui berbagai forum kebahasaan dan kesastraan, baik tingkat nasional maupun daerah. Aspirasi ini mencerminkan kebutuhan, harapan, serta tantangan masyarakat terhadap pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia, daerah, serta peningkatan literasi di wilayah DIY. Berikut ini ringkasan aspirasi dari berbagai forum strategis tersebut.

1. Kongres Bahasa Indonesia XII (2023)
  - a. Penguatan regulasi kebahasaan nasional agar bahasa Indonesia menjadi jati diri bangsa dan simbol pemersatu
  - b. Perluasan fungsi bahasa Indonesia ke ranah internasional melalui program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
  - c. Standarisasi kompetensi berbahasa (UKBI) bagi profesi dan lembaga
  - d. Peningkatan literasi dan budaya baca sebagai fondasi pembangunan manusia Indonesia

**Tabel**  
**Rekomendasi Komisi VIII**  
**Konsolidasi Nasional 2025**

| <b>A. Kedaulatan Bahasa Indonesia</b> |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Penguatan kebijakan</b>            |   |
| 1.                                    | Penguatan Kebijakan   |
|                                       | Penguatan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) sebagai Instrumen Standar Nasional <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil UKBI dijadikan sebagai salah satu indikator peningkatan jenjang karier guru, kepala sekolah, pengawas, serta pejabat struktural dan fungsional, guna meningkatkan mutu komunikasi profesional dan akademik dalam bahasa Indonesia (UKBI sebagai prasyarat karier ASN dan pendidik).</li> <li>b. Tenaga kerja asing wajib memiliki sertifikat UKBI sebagai bukti kemampuan berbahasa Indonesia yang fungsional sebelum bekerja di wilayah NKRI.</li> </ol> |

|   |   |
|---|---|
|   | c. UKBI diintegrasikan dengan sistem kepegawaian dan pendidikan nasional, serta interkoneksi dengan sistem digital keuangan negara (SIMPONI).   |
| 2.  | <p>Penguatan Sistem Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia</p> <p>a. Pengawasan dilakukan secara sistemik dimulai dari sosialisasi regulasi, pemantauan lapangan (objek lanskap dan dokumen), pendampingan lembaga, hingga evaluasi dan penghargaan.</p> <p>b. Pengawasan berbasis data dan klasifikasi objek bahasa dilakukan secara bertahap dan terukur dengan melibatkan satuan pendidikan, lembaga pemerintah/swasta, media, dan masyarakat.</p> <p>c. Penguatan kerangka regulasi daerah (Perda/Pergub/Perbup) menjadi strategi desentralisasi pengawasan bahasa sesuai karakter wilayah.</p> |
| <b>B. Peningkatan Literasi Berbasis Bahasa dan sastra</b> |   |
| <b>Penguatan kebijakan</b>                                |   |
| 1.  | Kegiatan Revitalisasi Bahasa Daerah dalam Program Tahunan   |
|   | <p>Pembentukan Infrastruktur Pelindungan Bahasa Daerah</p> <p>a. Membentuk bidang khusus dalam struktur Dinas Pendidikan yang menangani pelindungan bahasa dan sastra daerah</p> <p>b. Menyusun standar kurikulum nasional tentang pembelajaran bahasa daerah sebagai rujukan penyusunan muatan lokal daerah</p>  |
| 2.  | <p>Penguatan SDM Bahasa Daerah dan Kolaborasi Pendidikan</p> <p>a. Membuka jurusan pendidikan bahasa daerah di perguruan tinggi untuk mencetak tenaga pengajar yang profesional</p> <p>b. Memasukkan bahasa daerah sebagai mata kuliah pilihan di semua program studi bahasa di perguruan tinggi</p> <p>c. Memberdayakan maestro, budayawan, dan guru utama dalam pembelajaran bahasa daerah di satuan pendidikan</p> <p>d. Menyediakan formasi ASN untuk lulusan program studi bahasa daerah sebagai guru bahasa daerah</p>  |
| 3.  | <p>Model Revitalisasi Kontekstual dan Berbasis Komunitas</p> <p>a. Menyesuaikan model revitalisasi berdasarkan kantong bahasa daerah masing-masing, memperhatikan sebaran geografis, sosiologis, dan kultural</p> <p>b. Meningkatkan kolaborasi antara dinas pendidikan, komunitas literasi, dan komunitas budaya lokal dalam membangun aktivitas pelestarian berkelanjutan</p>   |
| 4.  | <p>Perluasan Gerakan Revitalisasi</p> <p>a. Mengadakan kegiatan serupa Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) untuk jenjang SMA/SMK sederajat agar kesinambungan pelestarian bahasa berlanjut di usia remaja</p>  |

## 2. Konsolidasi Nasional dan Daerah (2025)

- a. Pelayanan publik kebahasaan yang cepat, interaktif, dan berbasis digital
- b. Kolaborasi antara Balai Bahasa, pemerintah daerah, dan komunitas literasi
- c. Penegakan kebijakan bahasa negara di ruang publik dengan sistem monitoring berkelanjutan

## 3. Kongres Bahasa Jawa VII (2023)

- a. Revitalisasi pembelajaran bahasa Jawa di sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA
- b. Pengembangan Uji Kemahiran Bahasa Jawa dan standar pengajaran bahasa daerah
- c. Peningkatan kompetensi guru bahasa Jawa melalui pelatihan dan sertifikasi

4. Kongres Kebudayaan Jawa III (2022)
  - a. Pemertahanan sastra dan tradisi tutur Jawa sebagai bagian identitas budaya
  - b. Sinergi lembaga kebahasaan dan kebudayaan dalam perlindungan bahasa daerah
  - c. Penguatan identitas budaya lokal melalui bahasa dan aksara
  
5. Kongres Aksara Jawa I (2021)
  - a. Standarisasi tata bahasa dan aksara Jawa (Pedoman Umum Jawa-Latin)
  - b. Digitalisasi naskah kuno dan platform pembelajaran aksara Jawa
  - c. Revitalisasi literatur klasik Jawa melalui teknologi digital
  
6. Forum Konsultasi Publik Balai Bahasa DIY (2025)
  - a. Peningkatan mutu layanan dan pemerataan pembinaan bahasa ke daerah pinggiran
  - b. Kemitraan aktif Balai Bahasa dengan lembaga pendidikan, media, dan komunitas literasi
  - c. Peran Balai Bahasa sebagai pusat rujukan kebahasaan dan kesastraan yang terbuka dan edukatif

## **1.2 Potensi dan Permasalahan**

Pembangunan kebahasaan dan kesastraan pada periode 2020—2024 telah dilaksanakan dengan baik dan menorehkan catatan positif. Berbagai capaian menunjukkan keberhasilan di semua program prioritas. Namun, luasnya cakupan pembangunan kebahasaan masih memerlukan penanganan serius secara masif dan berdampak nyata. Oleh sebab itu, perlu dianalisis berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan ke depan. Berikut ini identifikasi dan analisis berbagai faktor tersebut.

### **1.2.1 Faktor Internal**

1. Kekuatan
  - a. Balai Bahasa Provinsi DIY memiliki kelembagaan yang kuat sebagai UPT Badan Bahasa.
  - b. Balai Bahasa memiliki SDM yang kompeten di bidang kebahasaan dan kesastraan.
  - c. Balai Bahasa memiliki koleksi karya sastra dan bahan literasi yang memadai.
  - d. Balai Bahasa telah mengintegrasikan teknologi dalam layanan kebahasaan, seperti UKBI, KBBI Daring, dan KBJI Daring.

2. Kelemahan
  - a. Kompetensi SDM belum merata, terutama di bidang linguistik forensik, filologi, dan bahasa Jawa ragam krama.
  - b. Sarana pelaksanaan UKBI masih terbatas.
  - c. Media penyuluhan kebahasaan belum menjangkau semua lapisan masyarakat.
  - d. Belum ada regulasi yang mewajibkan pemanfaatan UKBI di wilayah DIY.

### **1.2.2 Faktor Eksternal**

1. Peluang
  - a. Adanya dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa.
  - b. Tumbuhnya komunitas literasi dan citra DIY sebagai pusat pendidikan nasional.
  - c. Akademisi dan lembaga pendidikan di DIY menjadi mitra pengembangan program kebahasaan.
  - d. Terjalin kerja sama yang baik antara Balai Bahasa dan pemerintah daerah.
2. Ancaman
  - a. Sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia serta daerah masih rendah.
  - b. Kemampuan berbahasa Jawa, terutama ragam krama, pada generasi muda mengalami penurunan.
  - c. Bahasa asing (terutama bahasa Inggris) mendominasi media digital dan ruang publik.
  - d. Kompetensi literasi masyarakat yang tercermin dari hasil PISA yang menurun cenderung lemah.
  - e. Banyak kesalahan berbahasa di media luar ruang dan dokumen resmi pemerintah.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1 Visi**

##### **2.1.1 Visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai Visi sebagai berikut.

*Terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan Dukungan Partisipasi Semesta dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*

Visi ini menggambarkan bahwa Indonesia bercita-cita memiliki sistem pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh warga negara, dengan dukungan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, demi mencapai kemajuan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera pada tahun 2045.

Sebagai salah satu unit utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendukung visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal itu diwujudkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan melalui peningkatan kecakapan literasi membaca, pelestarian bahasa dan sastra daerah, pemertabatan bahasa dan sastra daerah serta penginternasionalan bahasa Indonesia.

##### **2.1.2 Visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Mengacu pada Visi Kementerian tersebut, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan nasional bidang kebahasaan akan mengedepankan gotong-royong guna mencapai kedaulatan bahasa, bangga, mahir, maju, dan pendidikan untuk semua, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan visi sesuai dengan visi Kementerian dan Presiden sebagai berikut.

*Terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan Dukungan Partisipasi Semesta dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 melalui Bahasa dan Sastra*

## **2.2 Misi**

### **2.2.1 Misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai misi

1. mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran;
2. mewujudkan kedaulatan bahasa Indonesia melalui pembangunan kebahasaan dan kesastraan; dan
3. mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

### **2.2.2 Misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa secara langsung mendukung tiga misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkaitan dengan kualitas pembelajaran, kedaulatan bahasa, dan tata kelola pendidikan. Dalam mendukung misi tersebut, Badan Bahasa memiliki misi secara lebih spesifik sebagai berikut.

1. Mewujudkan kecakapan literasi pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan
2. Mewujudkan pemertabatan bahasa Indonesia
3. Mewujudkan kelestarian bahasa daerah
4. Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional
5. Mengoptimalkan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Balai Bahasa Provinsi DIY sebagai unit pelaksana teknis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, oleh karena itu visinya mengacu/sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Balai Bahasa Provinsi DIY akan melaksanakan sesuai dengan karakteristik Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Kebijakan keistimewaan yang memberikan ruang bagi perlindungan bahasa daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa. Kebijakan ini pelaksanaannya diatur melalui Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021.

2. Jaringan pendidikan dan kebudayaan yang kuat, meliputi 113 perguruan tinggi, ratusan sanggar seni, puluhan komunitas literasi yang tersebar di lima kabupaten/kota, dan ribuan karya bahasa dan sastra yang dipublikasikan setiap tahun.
3. Warisan budaya lisan dan tulis (naskah kuna, tembang, wayang) yang menjadi sumber pembelajaran tak ternilai. Warisan budaya itu mengandung nilai sejarah, etika, dan kearifan lokal yang membentuk identitas kebudayaan bangsa Indonesia.

## 2.3 Tujuan

### 2.3.1 Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Perumusan tujuan Kementerian ditujukan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi-misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan bidang tugas Kementerian. Tujuan dan Indikator Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah sebagai berikut.

**Tabel**  
**Tujuan dan Indikator Tujuan**  
**Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**

| No. | Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah   | Indikator Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah   |
|-----|--|--|
| 1.  | Meningkatnya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah yang Berkeadilan                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD</li> <li>2. Angka Partisipasi Sekolah 7—18 Tahun</li> </ol>  |
| 2.  | Penguatan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Kualitas Lingkungan Belajar PAUD</li> <li>2. Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Literasi Membaca</li> <li>b. Numerasi</li> </ol> </li> <li>3. Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, Indeks Inklusivitas, dan Kebinekaan pada Kategori Baik</li> </ol> |
| 3.  | Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan serta Pengarusutamaannya dalam Dunia Pendidikan dan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Pembangunan Kebahasaan</li> <li>2. Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia</li> </ol>   |
| 4.  | Meningkatnya Mutu Layanan dan Relevansi Pendidikan Vokasi  | Persentase Angkatan Kerja Lulusan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Waktu Kurang dari 1 Tahun  |
| 5.  | Menguatnya Sistem Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel       | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian   |

### 2.3.2 Tujuan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Sesuai dengan tujuan dan indikator tujuan pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Bahasa memiliki Tujuan dan Indikator Tujuan sebagai berikut.

**Tabel**  
**Tujuan dan Indikator Tujuan**  
**Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

| No. | Tujuan Badan Bahasa  | Indikator Tujuan Badan Bahasa  | Target Keberhasilan 2029 |
|-----|--|--|--------------------------|
| 1.  | Menguatnya Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan | Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional; Literasi Membaca | 76,62                    |
| 2.  | Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan  | 1. Indeks Pembangunan Kebahasaan   | 55,01                    |
|     |  | 2. Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia   | 55,87                    |

### 2.3.3 Tujuan Balai Bahasa Provinsi DIY

Sesuai dengan tujuan dan indikator tujuan pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Balai Bahasa Provinsi DIY memiliki Tujuan dan Indikator Tujuan sebagai berikut.

**Tabel**  
**Tujuan dan Indikator Tujuan**  
**Balai Bahasa Provinsi DIY**

| No. | Tujuan Balai Bahasa Provinsi DIY                      | Indikator Tujuan Balai Bahasa   | Target Keberhasilan 2029 |
|-----|---|---|--------------------------|
| 1.  | Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik | 1. Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca                 | 80                       |
|     |   | 2. Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik                  | 48                       |
|     |   | 3. Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik                  | 70                       |
| 2.  | Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia      | 1. Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesinya | 49                       |
|     |   | 2. Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya                    | 72                       |
| 3.  | Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas        | 1. Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya           | 72.654                   |

|    |   |  |       |
|----|---|--|-------|
|    | dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan                             | 2. Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya         | 70    |
| 4. | Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra         | Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi                     | 57,76 |
| 5. | Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra     | Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara yang Terverifikasi dalam Peta Kebinekaan        | 18,8  |
|    |   | Rasio Pengajar Bahasa Daerah terhadap Penutur Muda yang Terimbas                                 | 1:30  |
| 6. | Meningkatnya Fasilitasi terhadap Lembaga Penyelenggara Program BIPA | Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terasilitasi | 57    |
| 7. | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola                                   | 1. Nilai Kinerja Anggaran  | 99    |
|    |   | 2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  | A     |

## 2.4 Sasaran Strategis

### 2.4.1 Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Sasaran strategis merupakan tujuan jangka panjang spesifik yang ditetapkan untuk mencapai kondisi masa depan yang diinginkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan sasaran strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan yang akan dicapai tahun 2029 sebagai berikut.

**Tabel**  
**Sasaran Strategis**  
**Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Sasaran Strategis  |
|-----|---|--|
| 1.  | Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah yang Berkeadilan untuk Semua        | 1. Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/ Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD<br>2. Angka Partisipasi Sekolah 7--18 tahun  |
| 2.  | Meningkatnya Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan | 1. Nilai Kualitas Lingkungan Belajar PAUD<br>2. Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional<br>a. Literasi Membaca<br>b. Numerasi<br>c. Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebhinekaan pada Kategori Baik |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 3. | Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan   | 1. Indeks Pembangunan Kebahasaan<br>2. Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia                  |
| 4. | Meningkatnya Mutu dan Daya Saing Pendidikan Vokasi  | Persentase Angkatan Kerja Lulusan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Waktu Kurang dari 1 Tahun |
| 5. | Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian  |

**2.4.2 Sasaran Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa** Mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan mengampu tiga sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian sebagai berikut.

**Tabel**  
**Sasaran Strategis**  
**Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Sasaran Strategis   |
|-----|---|---|
| 1.  | Meningkatnya Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan   | Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional<br>A. Literasi Membaca |
| 2.  | Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan   | a. Indeks Pembangunan Kebahasaan<br>b. Indeks Penginternasioinalan Bahasa Indonesia   |
| 3.  | Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel | Indeks Reformasi Birokrasi  |

## 2.5 Sasaran Program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dalam upaya mencapai sasaran strategis, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan empat sasaran program tahun 2025—2029. Secara terperinci sasaran program beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel**  
**Sasaran Program**  
**Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

| No. | Sasaran Program  | Indikator Kinerja Program  | Target |       |       |       |       |
|-----|--|--|--------|-------|-------|-------|-------|
|     |  |  | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Pembelajaran, Kompetensi, dan Karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan | Persentase Satuan Pendidikan yang peserta didiknya meningkat kualitas literasi membaca                           | 64     | 68    | 72    | 76    | 80    |
| 2.  | Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan  | Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia  | 82,52  | 83,02 | 83,52 | 84,02 | 84,52 |
|     |  | Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra                             | 48,13  | 49,45 | 50,15 | 50,73 | 51,6  |
|     |  | Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni | 11,09  | 11,39 | 11,55 | 11,68 | 11,89 |
|     |  | Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni | 11,09  | 11,39 | 11,55 | 11,68 | 11,89 |
|     |  | Indeks Pelestarian Bahasa Daerah (IPBD)  | 54,42  | 55,14 | 55,86 | 56,58 | 57,29 |

| No. | Sasaran Program                               | Indikator Kinerja Program  | Target      |             |             |             |             |
|-----|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   |  | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|     |   | Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan | 55          | 55,50       | 56          | 56,50       | 57          |
|     |   | Persentase Lembaga Internasional yang Memanfaatkan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan         | 1,4         | 2,3         | 3,3         | 4,2         | 5,6         |
| 3.  | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian | Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa                                 | Sangat Baik |
|     |   | Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa             | A           | A           | A           | A           | AA          |

## 2.6 Sasaran Kegiatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dalam upaya mencapai sasaran program, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan tujuh sasaran kegiatan tahun 2025—2029. Secara terperinci sasaran kegiatan beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

| Kode         | Sasaran Kegiatan (SK)/<br>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)           | Satuan     | Target |       |       |       |      |
|--------------|--|------------|--------|-------|-------|-------|------|
|              |  |            | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029 |
| <b>7569</b>  | <b>Peningkatan Kecakapan Literasi</b>                                |            |        |       |       |       |      |
| <b>SK</b>    | <b>Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik</b>         |            |        |       |       |       |      |
| IKK 2.2.20.1 | Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca | Persentase | 64     | 68    | 72    | 76    | 80   |
| IKK 2.2.20.2 | Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik  | Persentase | 24     | 30    | 36    | 42    | 48   |
| IKK 2.2.20.3 | Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik  | Persentase | 12,96  | 26,30 | 40,37 | 54,81 | 70   |
| <b>7567</b>  | <b>Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia</b>                      |            |        |       |       |       |      |
| <b>SK</b>    | <b>Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia</b>              |            |        |       |       |       |      |

| Kode           | Sasaran Kegiatan (SK)/<br>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)  | Satuan     | Target |        |        |        |        |
|----------------|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                |   |            | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
| IKK<br>3.1.1.1 | Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesinya                              | Persentase | 41     | 43     | 45     | 47     | 49     |
| IKK<br>3.1.1.2 | Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya   | Persentase | 60     | 63     | 66     | 69     | 72     |
| <b>SK</b>      | <b>Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan</b>                     |            |        |        |        |        |        |
| IKK<br>3.1.2.1 | Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya  | Persentase | 59,930 | 63,136 | 66,342 | 69,548 | 72,754 |
| IKK<br>3.1.2.2 | Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina   | Persentase | 50     | 55     | 60     | 65     | 70     |
| <b>SK</b>      | <b>Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan</b>                     |            |        |        |        |        |        |
| IKK<br>3.1.2.1 | Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya  | Persentase | 59,930 | 63,136 | 66,342 | 69,548 | 72,754 |
| IKK<br>3.1.2.2 | Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya                             | Persentase | 50     | 55     | 60     | 65     | 70     |
| <b>SK</b>      | <b>Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra</b>  |            |        |        |        |        |        |
| IKK<br>3.1.3.1 | Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi                                      | Persentase | 11,55  | 23,10  | 34,66  | 46,21  | 57,76  |
| <b>7566</b>    | <b>Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah</b>   |            |        |        |        |        |        |
| <b>SK</b>      | <b>Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra</b>   |            |        |        |        |        |        |
| IKK<br>3.1.4.1 | Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara yang Terverifikasi dalam Peta Kebinekaan                         | Persentase | 6,4    | 17,6   | 17,9   | 18,5   | 18,8   |
| IKK<br>3.1.4.2 | Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas  | Rasio      | 1:18   | 1:20   | 1:22   | 1:25   | 1:30   |
| <b>7568</b>    | <b>Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia</b>  |            |        |        |        |        |        |
| <b>SK</b>      | <b>Meningkatnya Fasilitas terhadap Lembaga Penyelenggara Program BIPA</b>   |            |        |        |        |        |        |
| IKK<br>3.2.1.1 | Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi a. Luar Negeri  | Persentase | -      | -      | -      | -      | -      |
| IKK<br>3.2.1.2 | Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi a. Dalam Negeri | Persentase | 55     | 55,5   | 56     | 56,5   | 57     |
| <b>SK</b>      | <b>Meningkatnya Pemanfaatan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan di Lembaga Internasional</b>              |            |        |        |        |        |        |
| IKK<br>3.2.2.1 | Persentase Bahan Kebahasaan dan Kesastraan yang Dimanfaatkan di orum  | Persentase | -      | -      | -      | -      | -      |

| Kode            | Sasaran Kegiatan (SK)/<br>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)   | Satuan     | Target |      |      |      |      |
|-----------------|--|------------|--------|------|------|------|------|
|                 |  |            | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|                 | Internasional  |            |        |      |      |      |      |
| <b>7613</b>     | <b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</b>                                 |            |        |      |      |      |      |
| <b>SK</b>       | <b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</b>   |            |        |      |      |      |      |
| IKK<br>5.1.27.1 | Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik                  | Persentase | 95     | 96   | 97   | 98   | 99   |
| IKK<br>5.1.28.1 | Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A | Persentase | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |

## 2.7 Sasaran Kegiatan Balai Bahasa Provinsi DIY

Dalam upaya mencapai sasaran kegiatan, Balai Bahasa Provinsi DIY merujuk pada Badan Bahasa yang berupa tujuh sasaran kegiatan tahun 2025—2029. Secara terperinci sasaran kegiatan beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

| Kode            | Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator<br>Kinerja Kegiatan (IKK)                                    | Satuan     | Target |        |        |        |        |
|-----------------|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 |   |            | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
| <b>7569</b>     | <b>Peningkatan Kecakapan Literasi</b>   |            |        |        |        |        |        |
| <b>SK</b>       | <b>Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik</b>                                  |            |        |        |        |        |        |
| IKK<br>2.2.20.1 | Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca                          | Persentase | 64     | 68     | 72     | 76     | 80     |
| IKK<br>2.2.20.2 | Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik                           | Persentase | 24     | 30     | 36     | 42     | 48     |
| IKK<br>2.2.20.3 | Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik                           | Persentase | 12,96  | 26,30  | 40,37  | 54,81  | 70     |
| <b>7567</b>     | <b>Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia</b>   |            |        |        |        |        |        |
| <b>SK</b>       | <b>Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia</b>                                       |            |        |        |        |        |        |
| IKK<br>3.1.1.1  | Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesinya          | Persentase | 41     | 43     | 45     | 47     | 49     |
| IKK<br>3.1.1.2  | Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya                             | Persentase | 60     | 63     | 66     | 69     | 72     |
| <b>SK</b>       | <b>Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan</b> |            |        |        |        |        |        |
| IKK<br>3.1.2.1  | Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya                    | Persentase | 59,930 | 63,136 | 66,342 | 69,548 | 72,754 |
| IKK<br>3.1.2.2  | Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina   | Persentase | 50     | 55     | 60     | 65     | 70     |

| Kode            | Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)  | Satuan     | Target |        |        |        |        |
|-----------------|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 |  |            | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
| <b>SK</b>       | <b>Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan</b>  |            |        |        |        |        |        |
| IKK<br>3.1.2.1  | Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya   | Persentase | 59,930 | 63,136 | 66,342 | 69,548 | 72,754 |
| IKK<br>3.1.2.2  | Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya  | Persentase | 50     | 55     | 60     | 65     | 70     |
| <b>SK</b>       | <b>Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra</b>   |            |        |        |        |        |        |
| IKK<br>3.1.3.1  | Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi   | Persentase | 11,55  | 23,10  | 34,66  | 46,21  | 57,76  |
| <b>7566</b>     | <b>Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah</b>  |            |        |        |        |        |        |
| <b>SK</b>       | <b>Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra</b>  |            |        |        |        |        |        |
| IKK<br>3.1.4.1  | Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara yang Terverifikasi dalam Peta Kebinekaan  | Persentase | 6,4    | 17,6   | 17,9   | 18,5   | 18,8   |
| IKK<br>3.1.4.2  | Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas   | Rasio      | 1:18   | 1:20   | 1:22   | 1:25   | 1:30   |
| <b>7568</b>     | <b>Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia</b>   |            |        |        |        |        |        |
| <b>SK</b>       | <b>Meningkatnya Fasilitas terhadap Lembaga Penyelenggara Program BIPA</b>  |            |        |        |        |        |        |
| IKK<br>3.2.1.1  | Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi a. Luar Negeri                       | Persentase | -      | -      | -      | -      | -      |
| IKK<br>3.2.1.2  | Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi a. Dalam Negeri                      | Persentase | 55     | 55,5   | 56     | 56,5   | 57     |
| <b>SK</b>       | <b>Meningkatnya Pemanfaatan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan di Lembaga Internasional</b>                                   |            |        |        |        |        |        |
| IKK<br>3.2.2.1  | Persentase Bahan Kebahasaan dan Kesastraan yang Dimanfaatkan di Forum Internasional  | Persentase | -      | -      | -      | -      | -      |
| <b>7613</b>     | <b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</b>                                 |            |        |        |        |        |        |
| <b>SK</b>       | <b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</b>   |            |        |        |        |        |        |
| IKK<br>5.1.27.1 | Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik                  | Persentase | 95     | 96     | 97     | 98     | 99     |
| IKK<br>5.1.28.1 | Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A | Persentase | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |

## 2.8 Manajemen Risiko Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan Balai Bahasa Provinsi DIY

Manajemen risiko pembangunan kebahasaan dan kesastraan adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Sebagai salah satu bentuk pembangunan nasional, manajemen risiko pembangunan kebahasaan dan kesastraan merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa manajemen risiko pembangunan nasional (MRPN) merupakan suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas penanggung jawab dan pengelola kebijakan sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Dalam hubungan ini, manajemen risiko program pengembangan dan pembinaan bahasa ditetapkan mencakupi sasaran kegiatan Balai Bahasa Provinsi DIY, indikasi risiko, penanganan risiko atau rencana mitigasi, pemilik risiko, dan pengelola risiko.

**Tabel**  
**Indentifikasi Risiko**  
**Balai Bahasa Provinsi DIY**

| No. | Permasalahan   | Strategi (Sasaran Kegiatan)   | Identifikasi Risiko  |
|-----|--|---|--|
| 1.  | Sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia dan daerah yang masih rendah.                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik</li> <li>Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia</li> <li>Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi masyarakat dalam proses meningkatkan kopetensi literasi kurang.</li> <li>Komitmen pimpinan lembaga terkait masih kurang.</li> <li>Regulasi kebahasaan di tingkat pusat dan daerah (tata naskah dinas) belum selaras.</li> </ol> |
| 2.  | Ketimpangan akses literasi (tidak terjangkau secara merata, kekurangan bahan bacaan bermutu, ketergantungan digital) | <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia</li> <li>Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Konsistensi/pendampingan jangka panjang masih kurang.</li> <li>Partisipasi masyarakat dalam proses meningkatkan kompetensi literasi kurang.</li> <li>Komitmen pimpinan lembaga terkait masih kurang.</li> </ol>                             |
| 3.  | Pemanfaatan produk dan layanan kebahasaan dan kesastraan belum optimal.  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik</li> <li>Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi masyarakat dalam proses meningkatkan kompetensi literasi kurang.</li> <li>Produk balai tidak sampai pada masyarakat.</li> </ol>   |

| No. | Permasalahan  | Strategi (Sasaran Kegiatan)   | Identifikasi Risiko  |
|-----|---|---|--|
|     |   | 3. Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra<br>4. Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra                                    |  |
| 4.  | Tingkat kefasihan berbahasa Jawa menurun.   | Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra   | 1. Jumlah penutur aktif berkurang.<br>2. Kebanggaan berbahasa daerah menurun.<br>3. Adanya Kesenjangan komunikasi antargenerasi.   |
| 5.  | Kompetensi literasi (berdasarkan turunnya hasil PISA) melemah.  | 1. Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik<br>2. Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa<br>3. Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra | 1. Partisipasi masyarakat dalam proses meningkatkan kompetensi literasi kurang.<br>2. Adanya ketergantungan model pembelajaran tradisional (karena adanya penurunan kualitas pelatihan).<br>3. Komitmen dalam membudayakan literasi kurang.  |
| 6.  | Menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing yang baik dan benar.               | 1. Meningkatnya Fasilitasi terhadap Lembaga Penyelenggara Program BIPA<br>2. Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan     | 1. Komitmen pimpinan lembaga terkait masih kurang.<br>2. SDM pengajar pada lembaga pengelola BIPA terbatas.<br>3. Standarisasi pola intervensi lembaga BIPA belum baku.  |
| 7.  | Belum optimalnya tata kelola organisasi dalam rangka pelaksanaan tupoksi (tata kelola SDM dan tata kelola anggaran) | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola   | 1. Pelaksanaan kegiatan belum konsisten.<br>2. Rekomendasi monitoring dan evaluasi kinerja dari pihak eksternal maupun internal tidak dimanfaatkan oleh satuan kerja untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan dan penyusunan program/kebijakan pada tahun berikutnya.<br>3. Kebijakan ditetapkan tidak berdasarkan data aktual, tidak melibatkan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya, dan advokasi kebijakan tidak optimal.<br>4. Objektivitas pelaksanaan pengawasan internal tidak terjadi karena adanya kepentingan beberapa pihak. |

Permasalahan dan risiko tersebut akan ditindaklanjuti melalui strategi dan sasaran program sebagaimana dijabarkan dalam Bab III dan Bab IV.

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,**  
**DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

**3.1 Arah Kebijakan**

**3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Arah kebijakan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025—2029. RPJMN Tahun 2025—2029 memuat *delapan* prioritas nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjabaran prioritas nasional meliputi

1. memperkuat ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikdasmen selaras dengan Prioritas Nasional butir *empat* dan *delapan* sebagai berikut.

Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,

kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dan untuk mewujudkan penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, arah kebijakan dirumuskan secara sistematis melalui strategi yang kemudian diterjemahkan ke dalam program pembangunan sebagai berikut.

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
3. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
4. Penguatan sistem tata kelola pendidikan
5. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja

### **3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Kemendikdasmen dalam rangka mendukung pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, dan sinergisitas pendidikan vokasi dengan dunia usaha/dunia industri. Hal tersebut juga dalam rangka mendukung program visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, serta mendukung keberlanjutan program Prioritas Nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Berikut ini arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

- 1) Perluasan Layanan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Mendukung Pendidikan Bermutu untuk Semua yang Berkeadilan
- 2) Penguatan Layanan PAUD dan 1 (Satu) Tahun Prasekolah
- 3) Penguatan Mutu Layanan, dan Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran, Kurikulum, dan Model Pembelajaran, serta Penilaian Pendidikan
- 4) Penguatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 5) Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi

6) Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan Bahasa Daerah dan Penginternasionalan Bahasa Indonesia

7) Penguatan Pembiayaan dan Tata Kelola Pendidikan

8) Penguatan Tatakelola serta Akuntabilitas Kementerian

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Kemendikdasmen dalam rangka mendukung pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, dan sinergisitas pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Hal tersebut juga dalam rangka mendukung program visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, serta mendukung keberlanjutan program Prioritas Nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Berikut ini adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Secara umum, kontribusi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikdasmen dalam menopang agenda pembangunan sebagai berikut.

1) Penguatan Mutu Layanan, dan Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran, Kurikulum, dan Model Pembelajaran, serta Penilaian Pendidikan

- a. Penguatan penerapan model pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar peserta didik, seperti literasi, numerasi, serta pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini.
- b. Peningkatan bahan ajar dan bahan belajar yang berkualitas, aman, dan berisi ilmu pengetahuan yang kaya untuk penguatan pengetahuan peserta didik, dan mendukung proses belajar dan mengajar yang berkualitas.
- c. Penguatan literasi melalui penyediaan bahan bacaan bermutu yang relevan dengan konteks pembelajaran, mudah diakses peserta didik, serta mendukung pengembangan kecakapan literasi.

2) Pembangunan kebahasaan dan kesastraan

- a. Revitalisasi bahasa daerah antara lain dengan pemberdayaan komunitas pelestari bahasa dan sastra daerah, penguatan literasi dan pelestarian bahasa daerah, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk pelestarian bahasa daerah.
- b. Pengembangan sastra dan apresiasi sastra Indonesia guna melestarikan sastra daerah dan memperluas pengakuan sastra Indonesia di kancah global melalui pemanfaatan buku sastra, pengadaan buku sastra baru untuk berbagai jenjang usia

- sejak PAUD sampai dengan SMA, penguatan pembelajaran sastra dalam kurikulum dan program penulisan buku sastra baru untuk berbagai jenjang pendidikan.
- c. Mendorong peningkatan generasi muda dan penutur bahasa untuk memperkuat kecintaan dan kompetensi generasi muda terhadap bahasa daerah dan bahasa Indonesia.
  - d. Penguatan pembinaan dan pengembangan bahasa dalam memperkuat keindonesiaan, mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, memperkuat bahasa lokal, mengembangkan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
  - e. Penginternasionalan Bahasa Indonesia dengan peningkatan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, penginternasionalan sastra Indonesia, peningkatan penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional, serta penerapan Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia.
- 3) Penguatan Tata Kelola serta Akuntabilitas Kementerian
- a. Memberikan pelayanan yang RAMAH (Responsif, Adaptif, Melayani, Akuntabel, dan Harmonis) dan SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong).
  - b. Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pendidikan yang transparan di tingkat pusat dan daerah.
  - c. Melanjutkan reformasi struktural Kementerian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja unit kerja.

### **3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diturunkan ke dalam arah kebijakan dan strategi Kemendikdasmen, berikut ini arah kebijakan dan strategi Badan Bahasa tahun 2025—2029.

#### **3.1.3.1 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan bidang kebahasaan dan kesastraan ditujukan pada empat fokus utama, yaitu (1) Peningkatan Kecakapan Literasi, (2) Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia, (3)

Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah, dan (4) Penginternasionalan Bahasa Indonesia. Empat fokus tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.



## 1) Peningkatan Kecakapan Literasi

Literasi secara operasional dapat dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, baik teks maupun nonteks, yang dilakukan secara kritis untuk meningkatkan kecakapan hidup manusia. Kecakapan literasi berhubungan erat dengan kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, dan mengolah bahasa. Untuk meningkatkan kecakapan literasi, Badan Bahasa berupaya menumbuhkembangkan pembiasaan baca-tulis, meningkatkan kemampuan bernalar kritis, dan meningkatkan daya kreasi dan apresiasi bahasa dan sastra Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui tiga ranah: sekolah, keluarga, dan masyarakat. Khusus di ranah sekolah, Badan Bahasa bermitra dengan seluruh pihak yang berada dalam ekosistem persekolahan (kepala sekolah, guru, dan komite sekolah).

Dalam implementasinya, peningkatan kecakapan literasi di ranah sekolah merupakan kontribusi langsung Badan Bahasa untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di seluruh pelosok negeri. Capaian utama yang diharapkan ialah

meningkatnya hasil belajar para peserta didik. Untuk mencapai hal tersebut, dilaksanakan berbagai upaya kolaboratif untuk meningkatkan dua aspek utama peningkatan literasi, yaitu

- a. Akses, melalui penyediaan bahan pengayaan pendukung literasi
- b. Kompetensi, melalui pembinaan kecakapan literasi pendidik dan tenaga kependidikan.

Peningkatan akses dilaksanakan melalui penyediaan bahan pengayaan pendukung literasi. Dalam hal ini, terdapat beraneka produk kebahasaan dan kesastraan yang dihasilkan oleh Badan Bahasa dan dapat dimanfaatkan oleh peserta didik. Produk-produk tersebut berupa, antara lain, buku bacaan bermutu (buku teks, buku audio, buku video, buku braille), komik, karya sastra yang dialihwahanakan, produk penerjemahan antarbahasa, dan kamus pelajar. Secara berkala buku bermutu dicetak dan disebarluaskan kepada sekolah-sekolah yang memiliki nilai literasi rendah dalam asesmen nasional. Selain dalam bentuk cetak, produk-produk tersebut dapat diakses melalui beberapa portal yang dimiliki Badan Bahasa, misalnya [budi.kemendikdasmen.go.id](http://budi.kemendikdasmen.go.id) dan [penjaring.kemendikdasmen.go.id](http://penjaring.kemendikdasmen.go.id). Semua produk dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk meningkatkan minat dan kemampuan baca tulis anak Indonesia.

Salah satu prioritas penting dalam rencana strategis 2025—2029 ialah dukungan Badan Bahasa terhadap pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang menjadi pendekatan Kemendikdasmen agar pengembangan peserta didik dilaksanakan melalui tiga prinsip utama, yaitu berkesadaran (*mindful*), bermakna (*meaningful*), dan menyenangkan (*joyful*). Badan Bahasa dapat menyediakan beragam media pembelajaran literasi yang dapat mendorong eksplorasi peserta didik melalui peningkatan kemampuan berbahasa dan bersastra. Media pembelajaran yang dihasilkan oleh Badan Bahasa dapat dimodifikasi menjadi buku besar (*big book*) yang dapat dibaca bersama di kelas, buku permainan kata, buku yang diselengi dengan audio atau musik, dan sebagainya. Media tersebut dapat digunakan oleh pendidik dan peserta didik dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sehingga tercipta pengalaman belajar yang reflektif, kontekstual, dan menggembirakan.

Sementara itu, peningkatan kompetensi dilaksanakan melalui pembinaan kecakapan literasi dengan sasaran pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Sasaran pembinaan diarahkan pada dua unsur, yaitu SDM pendidikan dan satuan pendidikan. SDM pendidikan (pendidik dan tenaga kependidikan) merupakan sasaran prioritas pembinaan yang diharapkan mampu mengimbaskan pengetahuannya kepada para peserta didik. Pembinaan dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi berbahasa Indonesia sebagai pintu masuk penguatan literasi. Selain terhadap SDM pendidikan, pembinaan juga dilaksanakan dengan objek satuan pendidikan. Pembinaan untuk lembaga ini diarahkan pada dua aspek, yaitu penggunaan bahasa di ruang publik dan penggunaan bahasa pada dokumen di lingkungan sekolah. Bahasa di ruang publik dan di dokumen sekolah merupakan media ajar otentik yang dilihat oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa yang tepat menjadi contoh baik yang dapat langsung diajarkan kepada peserta didik.

Guna mendukung pembelajaran mendalam, pembinaan terhadap SDM pendidikan juga dapat dimodifikasi, antara lain, dalam bentuk lomba-lomba untuk mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan sosial. Lomba puisi, monolog, drama, pidato, dan sejenisnya dapat menumbuhkan keberanian berekspresi, kecakapan menggunakan bahasa, dan berpikir kritis/logis. Lomba-lomba tersebut juga memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi para peserta didik sehingga diharapkan meninggalkan jejak positif dalam pengembangan diri mereka.

## Peningkatan Kecakapan Literasi

### Akses

#### Penyediaan

- Buku bermutu (buku teks, buku audio, buku video, buku braille, komik)
- Karya sastra yang dialihwahkan
- Kamus dan produk kodifikasi bagi pelajar
- Produk penerjemahan lintas bahasa

Modifikasi/inovasi:

- Buku besar (*big book*), buku teka teki, buku musik

### Kompetensi

#### Pembinaan

##### SDM Pendidikan

- Pendidik
- Peserta didik
- Tenaga kependidikan

##### Satuan Pendidikan

- Ruang publik
- Dokumen (laporan, persuratan, naskah dinas)

(jenjang SD, SMP, dan SMA)

Modifikasi/inovasi:

- Lomba puisi, monolog, drama, pidato, dsb.

## 2. Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

Pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia adalah upaya meningkatkan kedudukan, martabat, dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia serta karya sastra Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga keduanya diakui, dihargai, dan digunakan secara luas dengan penuh rasa bangga.

Pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia di tingkat nasional dilaksanakan melalui penguatan berbagai program kebahasaan dengan sasaran utama masyarakat umum di luar jalur pendidikan. Pemartabatan tersebut bertujuan meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia yang tecermin dari tiga aspek, yaitu kognitif (ide/pemikiran), afektif (mental/rasa), dan konatif (perbuatan). Pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia merupakan upaya kolektif yang terdiri atas penyediaan produk pengembangan bahasa, pembinaan SDM, pengujian kemahiran berbahasa, hingga pembinaan lembaga dan komunitas.



- Terdapat dua tonggak penting dalam pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia, yaitu
- a. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dan
  - b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4/7466/SJ tentang Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia serta Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Daerah.

Peraturan Mendikdasmen dan SE Mendagri melengkapi dan memperkuat upaya pemertabatan bahasa dan sastra Indonesia, terutama di daerah. Dengan hadirnya dua ketentuan tersebut, pemerintah daerah di seluruh provinsi memiliki acuan yang kuat untuk melaksanakan program kebahasaan dan kesastraan di daerah masing-masing. Dalam praktiknya, pemerintah daerah berkolaborasi dengan Balai/Kantor Bahasa untuk bersama-sama memertabatkan bahasa dan sastra Indonesia.



Sebagai tindak lanjut dari Permendikdasmen dan SE Mendagri tersebut, Balai/Kantor Bahasa di daerah melaksanakan konsolidasi daerah yang melibatkan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dari konsolidasi tersebut dihasilkan SK tentang tim pengawas penggunaan bahasa Indonesia yang melibatkan berbagai perangkat di daerah, seperti Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendidikan, dan Balai/Kantor Bahasa. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memertabatkan bahasa Indonesia di daerah akan menjadi salah satu prioritas penting dalam rencana strategis ini.



### 3) Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah

Pelestarian bahasa dan sastra daerah adalah upaya mempertahankan, menjaga, dan meningkatkan daya hidup bahasa dan sastra daerah agar tetap digunakan, dipelajari, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya sehingga tidak punah atau kehilangan fungsi sosialnya. Hal itu dilandasi pemahaman bahwa ketika sebuah bahasa atau sastra punah, dunia kehilangan sejumlah besar pengetahuan berharga, termasuk kearifan lokal, yang terhimpun dari generasi ke generasi.

Saat ini ihwal bahasa daerah bukan semata urusan lokal dan berorientasi masa lalu. Kepundahan bahasa daerah sudah menjadi isu nasional, bahkan internasional. Unesco telah menetapkan tahun 2022 sampai 2032 sebagai Dekade Internasional Bahasa Daerah sebagai seruan kepada seluruh negara di dunia untuk berpartisipasi melindungi bahasa daerah di wilayah masing-masing. Isu bahasa daerah sedemikian

penting karena berkaitan dengan hak asasi berbahasa (*linguistic rights*) yang melekat pada setiap individu.

Berkaitan dengan itu, Badan Bahasa melakukan berbagai aktivitas untuk melestarikan bahasa dan sastra daerah, mulai dari pemetaan bahasa, sastra, dan aksara, revitalisasi, konservasi, dan lain-lain. Pendekatan dengan melibatkan banyak pihak atau partisipasi semesta menjadi prioritas agar upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah lebih optimal, efektif, dan efisien.



#### 4) Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia

Penginternasionalan bahasa Indonesia merupakan usaha yang bertahap, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional bertujuan untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berjati diri teguh dan berdaya saing tinggi. Untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, dilakukan upaya diplomasi kebahasaan sebagai bentuk diplomasi lunak yang bertujuan untuk menguatkan literasi keindonesiaan dalam konteks global, dalam hal ini, meningkatkan pemahaman dan pengakuan masyarakat internasional terhadap peran dan pengaruh Indonesia, bangsa Indonesia, dan nilai-nilai keindonesiaan dalam peradaban dunia.

Pelaksanaan diplomasi kebahasaan untuk menguatkan literasi keindonesiaan dalam konteks global ditempuh melalui penyebaran bahasa Indonesia serta penguasaan dan pemanfaatan bahasa asing untuk tujuan strategis. Penyebaran bahasa Indonesia dilaksanakan melalui berbagai intervensi, antara lain, (1) pengembangan program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, (2) pengembangan dan pemberdayaan lembaga dan komunitas diplomasi kebahasaan di luar negeri, (3) pengembangan kerja sama internasional kebahasaan dan kesastraan, serta (4) fasilitasi penggunaan bahasa Indonesia dalam forum dan lembaga internasional. Sementara itu, penguasaan dan pemanfaatan bahasa asing untuk tujuan strategis dilaksanakan melalui berbagai aksi, antara lain, (1) fasilitasi penguasaan bahasa asing untuk mendukung diplomasi kebahasaan, (2) fasilitasi penguasaan bahasa asing bagi warga negara Indonesia untuk tujuan strategis, (3) penerjemahan karya sastra, dokumen, dan buku bernilai strategis, serta (4) penjurubahasaan dalam forum internasional strategis.

Sejalan dengan penerapan Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia, pelaksanaan diplomasi kebahasaan melalui penyebaran bahasa Indonesia berorientasi pada peningkatan fungsi (daya guna dan daya pajan) bahasa Indonesia dalam konteks global, yakni dalam berbagai ranah penggunaan atau komunikasi global dan di berbagai kawasan internasional dengan menggunakan pendekatan multidimensi. Pendekatan multidimensi dalam aksi penginternasionalan bahasa Indonesia tersebut meliputi (1) pendekatan pendidikan melalui dimensi pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, riset, dan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) pendekatan politik melalui dimensi politik dalam negeri dan luar negeri; (3) pendekatan ekonomi melalui dimensi investasi, perdagangan, perindustrian, ekonomi kreatif, dan ketenagakerjaan; (4) pendekatan sosial dan budaya melalui dimensi kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan, dan media; (5) pendekatan pertahanan dan keamanan melalui dimensi pertahanan dan dimensi keamanan; serta (6) pendekatan keagamaan melalui dimensi pendidikan keagamaan dan dimensi peribadatan.

Sesuai dengan lini masa dalam Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia, pada periode tahun 2025—2029, kegiatan penginternasionalan bahasa Indonesia berada pada tahap fondasi. Pada tahap tersebut, intervensi Badan Pengembangan dan Pembinaan

Bahasa difokuskan pada penguatan regulasi operasional dan tata kelola kelembagaan serta koordinasi dan fasilitasi berkelanjutan guna menunjang penguatan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, penerjemahan dan penjurubahasaan, peningkatan kemahiran berbahasa asing untuk mendukung diplomasi kebahasaan, serta pemberdayaan lembaga dan komunitas diplomasi kebahasaan.



### 3.1.3.2 Startegu Pelaksanaan Program

Untuk melaksanakan dua program teknis di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu (a) *Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran* dan (b) *Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan*, Badan Bahasa menerapkan strategi pelaksanaan program melalui pemberdayaan dua jalur penugasan, yaitu secara struktural dan secara fungsional. Secara struktural, program dilaksanakan melalui penjabaran sasaran dan target dari Kepala Badan kepada kepala pusat hingga kepala bidang. Secara fungsional, program dilaksanakan melalui pemfokusan kepakaran dan layanan kebahasaan. Pemberdayaan dua jalur tersebut dilaksanakan secara kolaboratif dan terintegrasi. Program melalui jalur struktural dan fungsional dilaksanakan di seluruh provinsi di bawah kendali para kepala unit pelaksana teknis di daerah.

Strategi pelaksanaan program melalui jalur struktural dilaksanakan dengan mengoptimalkan struktur kelembagaan yang ada di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kepala Badan dibantu Kepala Pusat melaksanakan fungsi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kepala Pusat dibantu Kepala Bidang menjalankan tiga tugas khusus bidang kebahasaan, yaitu

- a. Bidang Fasilitasi dan Advokasi Bahasa dan Sastra;
- b. Bidang Peningkatan dan Penguatan Literasi; dan
- c. Bidang Kemitraan dan Diplomsia Bahasa.

Tabel  
Tugas Bidang Kebahasaan

| <b>Kepala Pusat</b>                                  | <b>Kepala Bidang</b>                      | <b>UPT</b>                 |
|--|---|----------------------------|
| Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra | Fasilitasi dan Advokasi Bahasa dan Sastra | Kepala Balai/Kantor Bahasa |
| Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra                    | Peningkatan dan Penguatan Literasi        |                            |
| Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra                 | Kemitraan dan Diplomsia Bahasa            |                            |

Strategi pelaksanaan program melalui jalur fungsional dilaksanakan dengan memfokuskan kepakaran pegawai yang dimiliki oleh Badan Bahasa. Berdasarkan kepakaran tersebut, para pegawai dikelompokkan ke dalam lima tim kerja di tingkat pusat dan tiga tim kerja di tingkat UPT yaitu

a. Tim Kerja di tingkat pusat terdiri atas

- 1) Tim Kerja Perkamusan dan Peristilahan;
- 2) Tim Kerja Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra;
- 3) Tim Kerja Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia;
- 4) Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Hukum;
- 5) Tim Kerja Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing; dan
- 6) Tim Kerja Penerjemahan.

b. Tim Kerja di tingkat UPT terdiri atas

- 1) Tim Kerja Pengembangan;
- 2) Tim Kerja Pelindungan; dan
- 3) Tim Kerja Pembinaan

Koordinasi pelaksanaan program antara Tim Kerja Pusat dan UPT digambarkan sebagai berikut.

Tabel  
Koordinasi Pelaksanaan Program

| Penanggung Jawab                                     |  | Tim Kerja Pusat  | Tim Kerja UPT          |
|--|--|--|------------------------|
| Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra |  | Tim Kerja Perkamusan dan Peristilahan                  | Tim Kerja Pengembangan |
| Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra                 |  | Tim Kerja Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing          |                        |
| Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra |  | Tim Kerja Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra | Tim Kerja Pelindungan  |
| Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra                    |  | Tim Kerja Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia            | Tim Kerja Pembinaan    |
|  |  | Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Hukum                   |                        |
| Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra                 |  | Tim Kerja Penerjemahan                                 |                        |

### **3.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Bahasa Provinsi DIY**

Sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Bahasa Provinsi DIY menetapkan arah kebijakan dan strategi yang selaras dengan Rencana Strategis Badan Bahasa serta visi misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Arah kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan karakteristik khusus DIY sebagai pusat budaya Jawa dan Kota Pelajar, serta tantangan aktual yang dihadapi, seperti menurunnya vitalitas bahasa Jawa di kalangan generasi muda dan dominasi bahasa asing di ruang publik dan digital.

Untuk periode 2025–2029 difokuskan pada empat pilar utama, sebagai turunan dari kebijakan Badan Bahasa.

#### **3.1.4.1 Arah Kebijakan Balai Bahasa Provinsi DIY**

##### **1. Peningkatan Kecakapan Literasi Berbasis Kearifan Lokal**

Kebijakan ini diarahkan untuk menumbuhkembangkan budaya baca tulis dan bernalar kritis dengan memanfaatkan kekayaan sastra dan naskah Jawa kuna. Literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan fungsional, tetapi juga sebagai sarana penguatan karakter dan penanaman nilai-nilai luhur budaya lokal. Upaya ini dilaksanakan melalui tiga ranah: sekolah (bermitra dengan ekosistem pendidikan), keluarga, dan masyarakat (melibatkan komunitas literasi dan sanggar seni).

##### **2. Pemartabatan Bahasa Indonesia di Ruang Publik dan Dunia Pendidikan**

Kebijakan ini berfokus pada penguatan sikap positif dan kompetensi berbahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah dan konteks kekinian. Prioritas diberikan pada pembinaan penggunaan bahasa Indonesia di media lokal, dokumen resmi pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta lanskap bahasa di ruang publik strategis. Penguatan instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi tenaga pendidik, ASN, dan tenaga profesional menjadi salah satu strategi kunci.

##### **3. Revitalisasi Bahasa dan Sastra Jawa secara Kontekstual dan Berkelanjutan**

Kebijakan ini merupakan respons atas data yang mengindikasikan ancaman penurunan penggunaan Bahasa Jawa pada generasi muda. Revitalisasi diarahkan untuk menghidupkan kembali Bahasa Jawa dalam berbagai ranah penggunaan, baik melalui pendidikan formal (muatan lokal), nonformal (sanggar, komunitas), maupun informal (keluarga). Pendekatan kontekstual dilakukan dengan menyesuaikan model revitalisasi dengan karakteristik kawasan (perkotaan, pesisir, agraris) dan melibatkan maestro budaya, keluarga, dan pemengaruh (*influencer*) muda.

#### **4. Dukungan Terhadap Penginternasionalan Bahasa Indonesia melalui Diplomasi Budaya DIY**

Sebagai destinasi global untuk pendidikan dan pariwisata budaya, DIY menjadi pintu masuk yang strategis untuk mempromosikan Bahasa Indonesia kepada penutur asing (BIPA). Kebijakan ini diwujudkan dengan memfasilitasi dan mengoordinasi program BIPA di perguruan tinggi dan lembaga kursus di DIY serta menyediakan bahan ajar yang mengintegrasikan kekayaan budaya Yogyakarta. Diplomasi bahasa ini juga memperkuat posisi DIY sebagai destinasi riset kebahasaan dan kebudayaan.

##### **3.1.4.2 Strategi Pelaksanaan Program Balai Bahasa Provinsi DIY**

Strategi pelaksanaan program Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dirancang untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berbudaya melalui pemertabatan bahasa Indonesia, perlindungan dan revitalisasi bahasa serta sastra daerah, peningkatan literasi, dan penginternasionalan bahasa Indonesia. Seluruh strategi ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas literasi, dan masyarakat. Strategi pelaksanaan program meliputi lima pilar utama sebagai berikut.

##### **1. Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan**

Strategi penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan dilaksanakan untuk meningkatkan kecakapan membaca, menulis, dan mengapresiasi karya sastra masyarakat DIY. Strategi ini diwujudkan melalui

- a. pengembangan bahan bacaan literasi dan buku ajar berbasis budaya lokal yang relevan dengan karakter peserta didik di DIY;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis literasi bagi guru, duta bahasa, pegiat literasi, dan mahasiswa calon pendidik;
- c. penyelenggaraan kegiatan literasi publik, seperti Bulan Bahasa, Krida Literasi, dan Apresiasi Sastra;
- d. penguatan kemitraan dengan komunitas literasi dan perpustakaan daerah untuk pemerataan akses bahan bacaan di wilayah pinggiran; serta
- e. optimalisasi media digital Balai Bahasa DIY sebagai sarana literasi dan pembelajaran daring.

## **2. Pemertabatan Bahasa Indonesia**

Strategi pemertabatan bahasa Indonesia diarahkan untuk memperkuat fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa ilmu pengetahuan di ranah pendidikan, pemerintahan, dan ruang publik. Strategi ini diwujudkan melalui

- a. pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka bagi ASN, guru, mahasiswa, dan masyarakat umum;
- b. pembinaan dan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, media massa, dan lembaga pemerintahan;
- c. penyelenggaraan penyuluhan dan klinik kebahasaan untuk peningkatan kemampuan berbahasa dan penataan naskah dinas;
- d. penguatan layanan profesional kebahasaan seperti penyuntingan, penerjemahan, dan konsultasi bahasa; serta
- e. pemberian penghargaan kepada lembaga dan media yang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

## **3. Revitalisasi dan Pelindungan Bahasa serta Sastra Daerah**

Strategi revitalisasi dan pelindungan bahasa serta sastra daerah bertujuan mempertahankan eksistensi bahasa dan sastra Jawa sebagai identitas budaya masyarakat DIY. Pelaksanaannya dilakukan melalui

- a. implementasi program Revitalisasi Bahasa Daerah di lima kabupaten/kota di DIY dengan melibatkan guru utama, pelaku budaya, dan komunitas sastra;
- b. penyusunan modul pembelajaran bahasa Jawa yang kontekstual dan aplikatif untuk jenjang PAUD hingga SMA;
- c. penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) sebagai wadah apresiasi generasi muda;
- d. pemberdayaan maestro dan budayawan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Jawa di satuan pendidikan; serta
- e. pendokumentasian dan digitalisasi karya sastra lisan, aksara, dan naskah kuno Jawa bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga kebudayaan.

## **4. Internasionalisasi Bahasa Indonesia**

Strategi internasionalisasi bahasa Indonesia diarahkan untuk menjadikan Yogyakarta sebagai pusat pengembangan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di tingkat nasional. Pelaksanaan strategi ini meliputi

- a. fasilitasi dan pembinaan lembaga penyelenggara program BIPA di perguruan tinggi dan lembaga kursus di wilayah DIY;

- b. penyusunan dan penyebarluasan materi ajar BIPA yang mengintegrasikan kearifan lokal Yogyakarta;
- c. pelatihan pengajar BIPA serta penguatan jejaring kerja sama dengan lembaga asing dan diaspora Indonesia;
- d. pengembangan platform digital promosi BIPA yang menampilkan konten bahasa dan budaya Yogyakarta; serta
- e. kolaborasi diplomasi bahasa dan budaya dengan mitra internasional melalui kegiatan kebahasaan, kesastraan, dan seni.

#### **5. Penguatan Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Balai Bahasa**

Strategi penguatan tata kelola diarahkan untuk mewujudkan Balai Bahasa yang akuntabel, adaptif, dan berorientasi hasil. Pelaksanaan strategi ini meliputi

- a. penerapan manajemen kinerja berbasis hasil melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelaporan digital;
- b. peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan bidang kebahasaan, kesastraan, literasi digital, dan manajemen publik;
- c. pengembangan layanan kebahasaan berbasis digital, seperti UKBI daring, konsultasi bahasa, dan arsip sastra digital;
- d. penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas budaya, dan media massa untuk mendukung efektivitas program; serta
- e. optimalisasi pengelolaan sarana, prasarana, dan keuangan agar efisien, transparan, dan mendukung pencapaian kinerja.

### **3.2 Kerangka Regulasi**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikdasmen, beberapa regulasi yang diprioritaskan untuk dilakukan penyesuaian atau perubahan periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

**Tabel**  
**Kerangka Regulasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi  | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian  | Penanggung Jawab | Target Penyelesaian |
|-----|---|--|------------------|---------------------|
| 1.  | Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia perlu direvisi karena sudah tidak relevan.</li> <li>2. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur standar kemahiran berbahasa Indonesia yang lebih sesuai dengan kebutuhan mutakhir.</li> <li>1. 3. Sebagai upaya membentuk payung hukum untuk pemutakhiran layanan UKBI yang saat ini dilaksanakan secara daring.</li> </ol>  | Pusbin           | Tahun 2025          |
| 2.  | Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Indeks Pembangunan Kebahasaan                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Indeks Pembangunan Kebahasaan merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas upaya pelestarian, pembinaan, dan pengembangan bahasa.</li> <li>2. Indeks ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memantau pencapaian kebijakan kebahasaan di tingkat nasional dan regional, membantu pembuat kebijakan menilai efektivitas kebijakan yang ada, serta merumuskan strategi baru yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya indeks ini, kebijakan kebahasaan dapat lebih akurat, strategis, dan berbasis data, sehingga meningkatkan kualitas kebahasaan di Indonesia.</li> <li>3. Selain itu, Indeks Pembangunan Kebahasaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran bahasa dalam pembangunan nasional.</li> </ol> | Sekretariat      | Tahun 2026          |
| 3.  | Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta jalan ini merupakan amanat Kongres Bahasa Indonesia XII Tahun 2023</li> <li>2. Belum adanya regulasi yang memuat ketentuan terpadu untuk menunaikan amanat peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimandatkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 44.</li> <li>3. Regulasi tingkat Perpres diperlukan agar mengatur peran dari tiap K/L dalam menunaikan amanat UU 24/2009 tersebut.</li> </ol>  | Pusdaya          | Tahun 2026          |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                       | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian  | Penanggung Jawab | Target Penyelesaian |
|-----|--|--|------------------|---------------------|
| 4.  | Peraturan Presiden tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Terpadu Gerakan Literasi         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta jalan ini merupakan amanat Kongres Bahasa Indonesia XII Tahun 2023</li> <li>2. Program literasi tersebar di berbagai kementerian/ lembaga. Perlu ada peta jalan terpadu untuk menyinkronkan semua program tersebut.</li> <li>3. Regulasi tingkat Perpres diperlukan agar mampu mengatur peran dari tiap K/L dalam program literasi.</li> <li>4. Naskah akademik pernah disusun oleh Kemenko PMK sehingga Kemendikdasmen tidak memulai pembahasan dari nol.</li> </ol> | Pusbin           | Tahun 2027          |
| 5.  | Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pewarisan dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta jalan ini merupakan amanat Kongres Bahasa Indonesia XII Tahun 2023</li> <li>2. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang harus dilestarikan sesuai dengan amanat UUD.</li> <li>3. Pelestarian bahasa daerah merupakan isu internasional, nasional, dan lokal.</li> <li>4. Unesco memutuskan tahun 2022—2032 sebagai Dekade Internasional Bahasa Daerah.</li> </ol>  | Pusbanglin       | Tahun 2026          |

### 3.3 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Kemendikdasmen sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, diperlukan dukungan kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, tata kelola, dan manajemen aparatur sipil negara yang efektif dan efisien. Hal ini bertujuan agar Kemendikdasmen dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal. Kerangka kelembagaan ini diharapkan dapat memastikan penataan organisasi yang selaras dengan pencapaian sasaran strategis serta meningkatkan efektivitas kelembagaan melalui struktur organisasi yang tepat, proses organisasi yang efisien, dan pencegahan terjadinya duplikasi tugas dan fungsi.

### 3.3.1 Struktur Organisasi



### 3.3.2 Pengelolaan SDM Kebahasaan dan Kesastraan

Penyelenggaraan program kebahasaan dan kesastraan perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berintegritas dan kompeten. Sumber daya kebahasaan internal yang saat ini dimiliki oleh Balai Bahasa Yogyakarta sebanyak 39 pegawai dengan kategori sebagai berikut.

Status Kepegawaian: - PNS: 38 orang - PPPK: 1 Orang • Komposisi Jabatan: - Struktural: 2 orang - Fungsional: 18 orang - Pelaksana: 19 orang • Laki-laki: 20 Perempuan: 19 Rasio Laki-laki : Perempuan 51,3% : 48,7% S3: 0 S2: 8 S1: 27 SMA Sederajat: 4 BB: 0 Gen X: 27 Milenial 11 Gen Z: 1

Seluruh SDM diarahkan untuk bekerja berdasarkan prinsip profesionalisme, kompetensi, dan etika pelayanan publik. Strategi pengelolaan SDM meliputi

- pemetaan kompetensi dan kebutuhan pegawai, untuk memastikan penempatan pegawai sesuai bidang keahlian linguistik, kesastraan, literasi, maupun administrasi publik;
- peningkatan kapasitas dan profesionalisme melalui pelatihan teknis, lokakarya, dan program pengembangan kompetensi berkelanjutan di bidang linguistik, filologi, kebijakan bahasa, dan teknologi informasi;
- penguatan sistem penilaian kinerja individu (SKP digital) berbasis capaian *output* dan *outcome* kegiatan;
- pemberdayaan jabatan fungsional seperti peneliti, penerjemah, penyuluh bahasa, dan pengkaji bahasa untuk memperkuat kualitas produk kebahasaan dan kesastraan; serta

- e. pengembangan budaya kerja ASN BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sebagai nilai dasar organisasi.

Melalui manajemen SDM yang terencana dan terukur, Balai Bahasa DIY diharapkan menjadi organisasi pembelajar yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan dinamika kebijakan nasional.

Berdasarkan uraian di atas, peningkatan kompetensi pegawai Badan Bahasa 2025—2029 dirancang dengan prioritas sebagai berikut.

| Tahun | Agenda  | Uraian dan Hasil Kegiatan  |
|-------|---|--|
| 2025  | Pemetaan kompetensi dan Penyusunan Rencana Pengembangan SDM | 1. Memetakan kompetensi seluruh pegawai secara komprehensif<br>2. Menyusun peta jalan peningkatan kompetensi SDM<br>(Hasil: 2 Dokumen)                           |
| 2026  | Peningkatan kompetensi I                                    | 1. Meningkatkan kompetensi teknis (bidang kebahasaan utama dan bidang administratif)<br>2. Meningkatkan kompetensi manajerial<br><br>(Hasil: 2 Laporan Kegiatan) |
| 2027  | Peningkatan kompetensi II                                   | 1. Meningkatkan kompetensi teknis (bidang kebahasaan utama dan bidang administratif)<br>2. Meningkatkan kompetensi manajerial<br><br>(Hasil: 2 Laporan Kegiatan) |
| 2028  | Peningkatan Kompetensi III                                  | 1. Meningkatkan kompetensi teknis (bidang kebahasaan utama dan bidang administratif)<br>2. Meningkatkan kompetensi manajerial<br><br>(Hasil: 2 Laporan Kegiatan) |
| 2029  | Evaluasi dan Pembelajaran berkelanjutan                     | 1. Mengevaluasi efektivitas program peningkatan kompetensi<br>2. Menyusun rekomendasi untuk pembelajaran berkelanjutan<br><br>(Hasil: 2 Dokumen)                 |

### 3.3.3 Proyeksi Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan unsur pendukung utama keberhasilan pelaksanaan tugas Balai Bahasa DIY. Pemenuhan sarana prasarana diarahkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, ramah layanan publik, dan berwawasan teknologi hijau. Strategi pengelolaan sarana dan prasarana meliputi

- a. pemeliharaan dan pembaruan infrastruktur perkantoran agar memenuhi standar kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas;
- b. penguatan fasilitas layanan publik, termasuk ruang pelayanan kebahasaan, ruang UKBI, studio literasi digital, dan perpustakaan kebahasaan dan kesastraan;
- c. pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung sistem layanan digital, pengarsipan elektronik, dan pengelolaan data kebahasaan;
- d. peningkatan efisiensi pemanfaatan aset negara (BMN) melalui pengawasan internal dan sistem inventarisasi digital; serta
- e. pengembangan sarana ramah lingkungan dengan prinsip hemat energi, penggunaan teknologi hijau, dan pengelolaan limbah kantor yang berkelanjutan.

Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai tahun 2025—2029 diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan Balai Bahasa DIY dalam memberikan layanan kebahasaan dan kesastraan yang profesional, inklusif, dan modern.

### **3.3.4 Proyeksi Pengembangan Pemerintahan Digital (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE)**

Pengembangan Pemerintahan Digital atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada bidang kebahasaan dan kesastraan menjadi kerangka strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. SPBE Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berfungsi sebagai instrumen integrasi seluruh penyelenggaraan program kebahasaan, kesastraan, dan literasi agar berbasis data, terhubung antarunit, serta mudah diakses oleh masyarakat.

Pemerintahan digital dalam bidang kebahasaan mencakup empat aspek utama, yaitu

1. tata kelola kelembagaan berbasis teknologi informasi,
2. pengembangan produk, layanan, dan konten kebahasaan digital,
3. pengelolaan dan integrasi data kebahasaan, serta
4. peningkatan pelayanan dan partisipasi publik melalui kanal digital.

### **Arah Kebijakan dan Prioritas 2025—2029**

Pada periode 2025—2029, pengembangan pemerintahan digital di lingkungan Balai Bahasa DIY diarahkan pada beberapa prioritas utama berikut.

1. **Penyusunan Kebijakan Satu Data Kebahasaan dan Kesastraan**  
Menetapkan kebijakan satu data kebahasaan yang mengintegrasikan data pembinaan, pengembangan, perlindungan, dan pemasyarakatan bahasa dan sastra. Data tersebut

menjadi basis perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi kinerja kebahasaan di tingkat daerah dan nasional.

## **2. Penyusunan dan Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)**

Mengembangkan sistem pengamanan data dan informasi kebahasaan untuk menjamin integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data. Penerapan SMKI ini dilakukan sesuai dengan standar nasional keamanan informasi pemerintah dan pedoman SPBE Kementerian.

## **3. Pengelolaan Data Kebahasaan Terpadu**

Membangun basis data kebahasaan terpadu yang memuat data pengembangan, pembinaan, perlindungan, dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia serta bahasa daerah. Basis data ini akan diintegrasikan dengan sistem nasional "Satu Data Kebahasaan" yang dikelola oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

## **4. Digitalisasi Layanan Publik Kebahasaan dan Kesastraan**

Mengembangkan sistem layanan daring yang meliputi

- a. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Daring Adaptif Merdeka
- b. Konsultasi Bahasa dan Penyuluhan Daring
- c. Layanan Informasi BIPA
- d. Portal Dokumentasi Sastra dan Bahasa Daerah
- e. Layanan Literasi Digital Masyarakat

Layanan ini dirancang agar mudah diakses oleh masyarakat umum, lembaga pendidikan, dan instansi pemerintah daerah.

## **5. Penguatan Partisipasi Publik melalui Kanal Digital**

Mengembangkan partisipasi publik dalam kegiatan kebahasaan melalui media sosial, siniar, kanal YouTube, dan platform interaktif Balai Bahasa DIY. Upaya ini mendukung penyebaran informasi, literasi kebahasaan, dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian bahasa dan sastra daerah.

## **6. Integrasi dan Interoperabilitas Sistem SPBE Balai Bahasa DIY**

Menghubungkan seluruh sistem informasi internal Balai Bahasa (SIMONEV, SMART Balai Bahasa, SAKIP Digital, dan *e-office*) ke dalam satu portal pelayanan terpadu berbasis SPBE agar pengelolaan administrasi dan data kinerja menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diaudit.

### **3.3.5 Reformasi Birokrasi**

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Balai Bahasa DIY diarahkan untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan berintegritas. Reformasi birokrasi menjadi pilar utama dalam peningkatan kualitas layanan publik kebahasaan. Langkah strategis reformasi birokrasi meliputi

- a. penyederhanaan proses bisnis dan prosedur layanan publik untuk mempercepat pelayanan kebahasaan dan kesastraan;
- b. penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten melalui perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja berbasis hasil;
- c. peningkatan transparansi pengelolaan keuangan dan BMN melalui aplikasi digital yang terintegrasi dengan sistem kementerian;
- d. implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan fokus pada peningkatan integritas, pelayanan publik, dan pengawasan internal; serta
- e. pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan seperti UKBI Daring, Konsultasi Bahasa Daring, dan Sistem Layanan Kebahasaan Terpadu (SLKT).

Melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan, Balai Bahasa DIY berkomitmen untuk menjadi lembaga publik yang berdaya saing, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1 Target Kinerja**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan sasaran-sasaran yang merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan. Keberhasilan sasaran diukur dengan indikator-indikator kinerja tahun 2025—2029 sebagai berikut.

**Tabel**  
**Sasaran Strategis**

| Kode        | Sasaran Strategis (SS)/<br>Indikator Kinerja Sasaran<br>Strategis (IKSS)  | Satuan     | Target |       |       |       |       |
|-------------|---|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|             |   |            | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| <b>SS 2</b> | <b>Meningkatnya Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan</b>  |            |        |       |       |       |       |
| IKSS 2.2    | Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional:<br>a. a. Literasi Membaca | Persentase | 68,62  | 70,62 | 72,62 | 74,62 | 76,62 |
| <b>SS 3</b> | <b>Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan</b>  |            |        |       |       |       |       |
| IKSS 3.1    | Indeks Pembangunan Kebahasaan   | Indeks     | 51,31  | 52,72 | 53,46 | 54,08 | 55,01 |
| IKSS 3.2    | Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia   | Indeks     | 52,73  | 53,5  | 54,28 | 55,07 | 55,87 |
| <b>SS 5</b> | <b>Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabilitas</b>  |            |        |       |       |       |       |
| IKSS 5.1    | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian  | Indeks     | 89,35  | 90    | 90,10 | 90,20 | 90,30 |

**Tabel**  
**Sasaran Program**

| Kode        | Sasaran Program (SP)/<br>Indikator Kinerja Program  | Satuan     | Target      |             |             |             |             |
|-------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |   |            | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
| <b>SP 2</b> | <b>Meningkatnya Kualitas Pembelajaran, Kompetensi, dan Karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan</b> |            |             |             |             |             |             |
| IKP 2.2.20  | Persentase Satuan Pendidikan yang Peserta Didiknya Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca   | Persentase | 64          | 68          | 72          | 76          | 80          |
| <b>SP 3</b> | <b>Meningkatnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia</b>                                    |            |             |             |             |             |             |
| IKP 3.1.1   | Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia   | Angka      | 82,52       | 83,02       | 83,52       | 84,02       | 84,52       |
| IKP 3.1.2   | Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra  | Persentase | 48,13       | 49,45       | 50,15       | 50,73       | 51,6        |
| IKP 3.1.3   | Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni  | Persentase | 11,09       | 11,39       | 11,55       | 11,68       | 11,89       |
| IKP 3.1.4   | Indeks Pelestarian Bahasa Daerah (IPBD)   | Indeks     | 54,42       | 55,14       | 55,86       | 56,58       | 57,29       |
| IKP 3.2.1   | Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan  | Persentase | 55          | 55,5        | 56          | 56,5        | 57          |
| IKP 3.2.2   | Persentase Lembaga Internasional yang Memanfaatkan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan  | Persentase | 1,4         | 2,3         | 3,3         | 4,2         | 5,6         |
| <b>SP 5</b> | <b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian</b>  |            |             |             |             |             |             |
| IKP 5.1.27  | Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  | Katagori   | Sangat Baik |
| IKP 5.1.28  | Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  | Predikat   | A           | A           | A           | A           | AA          |

**Tabel**  
**Sasaran Kegiatan**

| Kode            | Sasaran Kegiatan (SK)/<br>Indikator Kinerja Kegiatan<br>(IKK)                                 | Satuan     | T     |        |        |        |        |
|-----------------|---|------------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                 |   |            | 2025  | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
| <b>7569</b>     | <b>Peningkatan Kecakapan Literasi</b>   |            |       |        |        |        |        |
| <b>SK</b>       | <b>Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik</b>                                  |            |       |        |        |        |        |
| IKK<br>2.2.20.1 | Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca                          | Persentase | 64    | 68     | 72     | 76     | 80     |
| IKK<br>2.2.20.2 | Persentase Produk Penerjemahan Yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik                           | Persentase | 24    | 30     | 36     | 42     | 48     |
| IKK<br>2.2.20.3 | Persentase Produk Pengembangan Yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik                           | Persentase | 12,96 | 26,30  | 40,37  | 54,81  | 70     |
| <b>7567</b>     | <b>Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia</b>   |            |       |        |        |        |        |
| <b>SK</b>       | <b>Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia</b>                                       |            |       |        |        |        |        |
| IKK<br>3.1.1.1  | Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesinya          | Persentase | 41    | 43     | 45     | 47     | 49     |
| IKK<br>3.1.1.2  | Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya                             | Persentase | 60    | 63     | 66     | 69     | 72     |
| <b>SK</b>       | <b>Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan</b> |            |       |        |        |        |        |
| IKK<br>3.1.2.1  | Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya                    | Persentase | 59,93 | 63,136 | 66,342 | 69,548 | 72,754 |
| IKK<br>3.1.2.2  | Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya         | Persentase | 50    | 55     | 60     | 65     | 70     |
| <b>SK</b>       | <b>Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra</b>                            |            |       |        |        |        |        |
| IKK<br>3.1.3.1  | Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi                  | Persentase | 11,55 | 23,10  | 34,66  | 46,21  | 57,76  |
| <b>7566</b>     | <b>Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah</b>   |            |       |        |        |        |        |

| Kode            | Sasaran Kegiatan (SK)/<br>Indikator Kinerja Kegiatan<br>(IKK)   | Satuan     | T    |      |      |      |      |
|-----------------|---|------------|------|------|------|------|------|
|                 |   |            | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| SK              | <b>Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra</b>   |            |      |      |      |      |      |
| IKK<br>3.1.4.1  | Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara yang Terverifikasi dalam Peta Kebinekaan                         | Persentase | 6,4  | 17,6 | 17,9 | 18,5 | 18,8 |
| IKK<br>3.1.4.2  | Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas  | Rasio      | 1:18 | 1:20 | 1:22 | 1:25 | 1:30 |
| <b>7568</b>     | <b>Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia</b>  |            |      |      |      |      |      |
| SK              | <b>Meningkatnya fasilitas terhadap lembaga penyelenggara program BIPA</b>   |            |      |      |      |      |      |
| IKK<br>3.2.1.1  | Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi b. Luar Negeri  | Persentase | 25   | 25,5 | 26   | 26,5 | 27   |
| IKK<br>3.2.1.2  | Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi b. Dalam Negeri | Persentase | 55   | 55,5 | 56   | 56,5 | 57   |
| SK              | <b>Meningkatnya Pemanfaatan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan di Lembaga Internasional</b>              |            |      |      |      |      |      |
| IKK<br>3.2.2.1  | Persentase Bahan Kebahasaan dan Kesastraan yang Dimanfaatkan di Forum Internasional                               | Persentase | 22   | 32   | 42   | 52   | 62   |
| SK              | <b>Meningkatnya Pemanfaatan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan di Lembaga Internasional</b>              |            |      |      |      |      |      |
| IKK<br>3.2.2.1  | Persentase Bahan Kebahasaan dan Kesastraan yang Dimanfaatkan di Forum Internasional                               | Persentase | 22   | 32   | 42   | 52   | 62   |
| <b>7613</b>     | <b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</b>            |            |      |      |      |      |      |
| SK              | <b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</b>                                  |            |      |      |      |      |      |
| IKK<br>5.1.27.1 | Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan   | Persentase | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   |

| Kode            | Sasaran Kegiatan (SK)/<br>Indikator Kinerja Kegiatan<br>(IKK)  | Satuan     | T    |      |      |      |      |
|-----------------|--|------------|------|------|------|------|------|
|                 |  |            | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| IKK<br>5.1.28.1 | Persentase Satuan Kerja di<br>Badan Pengembangan dan<br>Pembinaan Bahasa dengan<br>Predikat Akuntabilitas Kinerja<br>Instansi Pemerintah minimal A | Persentase | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka menjalankan amanat pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, diperlukan kerangka pendanaan yang memadai. Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan pendanaan fungsi pendidikan serta program dan kegiatan prioritas. Berkaitan dengan hal itu, kerangka pendanaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2025—2029 disusun sebagai berikut.

**Tabel**  
**Kerangka Pendanaan**

| Kode      | Program/Kegiatan  | Indikasi Kebutuhan<br>Pendanaan |            |            |            |            |
|-----------|---|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|           |   | 2025                            | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
| <b>DI</b> | <b>Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran</b>   |                                 |            |            |            |            |
| 7569      | Peningkatan Kecakapan Literasi  | 2.837.035                       | 2.300.579  | 2.553.642  | 2.809.000  | 3.089.907  |
| <b>DU</b> | <b>Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan</b>  |                                 |            |            |            |            |
| 7566      | Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah  | 1.387.314                       | 1.214.134  | 1.347.688  | 1.482.457  | 1.630.703  |
| 7567      | Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia  | 308.011                         | 1.645.822  | 1.826.862  | 1.826.862  | 1.826.862  |
| 7568      | Penginternasionalan Bahasa dan Sastra<br>Indonesia  | 128.109                         | 145.600    | 161.616    | 177.777    | 195.555    |
| <b>WA</b> | <b>Program Dukungan Manajemen</b>   |                                 |            |            |            |            |
| 7613      | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan<br>Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan<br>Pembinaan Bahasa | 5.283.239                       | 5.924.739  | 6.576.460  | 7.234.106  | 7.957.516  |
|           | Jumlah  | 9.943.708                       | 11.230.874 | 12.456.270 | 13.712.897 | 15.084.186 |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi DIY Tahun 2025—2029 merupakan gambaran dari kebijakan pembangunan jangka menengah dalam bidang kebahasaan dan kesastraan. Dokumen rencana strategis ini merupakan penjabaran dari (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029, (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025--2029, dan (3) Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Rencana Strategis ini menjabarkan visi dan misi Presiden beserta sasaran nasional. Dalam dokumen ini digambarkan keterkaitan antara agenda pembangunan nasional, sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Dalam implementasinya, rencana strategis ini digunakan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Bahasa. Selain itu, dokumen ini dapat pula dijadikan pedoman oleh pemangku kepentingan kebahasaan dan kesastraan, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun masyarakat. Dengan demikian, berbagai pihak dapat terlibat secara aktif, efektif, dan konstruktif dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

Guna meningkatkan kinerja program dan kegiatan, semua pihak dapat memberikan kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata. Dengan melibatkan publik secara lebih aktif dan terintegrasi, diharapkan kualitas pengelolaan bahasa dan sastra semakin meningkat sehingga dapat berkontribusi positif dalam menjaga kebinekaan an meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia

# Lampiran

1. [Matriks Kinerja Sasaran dan Indikator](#)
2. [Definisi Operasional Sasaran dan Indikator](#)
3. Target dan Anggaran Satuan Kerja 2025—2029

**Tabel Matriks Kegiatan  
Berdasarkan Rekomendasi/Masukan Masyarakat**

| No. | Kegiatan/<br>Rekomendasi   | Telah<br>dilaksanakan   | Jenis Kegiatan<br>Terkait (Program<br>Balai Bahasa DIY)                                  | Keterangan Program  |
|-----|--|---|--|---|
| 1.  | Pemberian kepastian legal formal terhadap pengembangan dan pembinaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dilaksanakan melalui penetapan regulasi baik pada level nasional, provinsi, kabupaten/kota serta peninjauan kembali secara periodik, termasuk usulan dan pengadaan formasi ASN dengan kompetensi bahasa, sastra, dan aksara Jawa. | Telah dilaksanakan oleh Pemda DIY dan DPRD DIY  | Pelayanan Ahli Bahasa Peraturan Perundang-undangan                                       | Selesai (Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa; Pergub DIY No. 64 Tahun 2023 tentang Bahasa Jawa Menjadi Muatan Lokal Wajib di Semua Sekolah dan Madrasah di DIY; Pergub DIY No. 43 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2021. |
| 2.  | Penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan dilaksanakan mulai dari jenjang PAUD hingga sekolah dasar sederajat kelas 3.   | Sudah dilaksanakan oleh Dispora Provinsi DIY dan 5 kabupaten/kota melalui mata pelajaran Bahasa Jawa SD–SMA | Konsultan Kurikulum dalam rangkaian Revitalisasi Bahasa Daerah                           | 2023–2025   |
| 3.  | Perekrutan guru mata pelajaran Bahasa Jawa dilaksanakan pada jenjang sekolah dasar sebagai guru mata pelajaran (bukan sebagai guru kelas).   | -   | -  | Masih dalam proses  |
| 4.  | Penyelarasan nomenklatur dan struktur kurikulum bahasa daerah di jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat dilaksanakan dengan menempatkannya dalam struktur kurikulum nasional.   | Sudah dilaksanakan oleh Dispora Provinsi DIY dan 5 kabupaten/kota melalui mata pelajaran Bahasa Jawa SD–SMA | Konsultan kurikulum dan penyunting bahan ajar dalam rangkaian Revitalisasi Bahasa Daerah | Selesai (Bahan Ajar Bahasa Jawa SD–SMA Sederajat diterbitkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga diy TAHUN 2024)  |
| 5.  | Pemetaan dilaksanakan melalui beberapa unsur, yaitu varietas, standarisasi,  | Sudah dilaksanakan oleh Pemda DIY dan Balai Bahasa DIY  | Pemetaan Kebhinekaan (pemetaan sastra  | Masih berlangsung   |

| <b>No.</b> | <b>Kegiatan/<br/>Rekomendasi</b>   | <b>Telah<br/>dilaksanakan</b>   | <b>Jenis Kegiatan<br/>Terkait (Program<br/>Balai Bahasa DIY)</b>                                    | <b>Keterangan Program</b>   |
|------------|--|---|---|---|
|            | digitasi, dan digitalisasi kebahasajawaan.   |   | lisan, cetak, dan manuskrip)  |   |
| 6.         | Pemutakhiran leksikon bahasa Jawa dengan melibatkan kontributor secara daring melalui mekanisme mediasi komisi istilah.  | Sudah dilaksanakan  | Terlaksana melalui program Pemerdayaan Kosakata dan Istilah   | Masih berlangsung   |
| 7.         | Penyebarluasan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dilaksanakan, baik dalam negeri maupun luar negeri, melalui pelibatan diaspora Jawa.  | Sudah dilaksanakan oleh Pemda DIY dan Balai Bahasa  | Terlaksana melalui program KBJI Daring, BIPA, Hari Literasi Internasional dalam rangka Bulan Bahasa | Terus berlanjut   |
| 8.         | Peningkatan kualitas dan kuantitas penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dilaksanakan melalui pelatihan, penyiapan bahan, penghargaan, pembakuan, selebrasi, dan pengembangan di 17 sektor ekonomi kreatif. | Telah dilaksanakan oleh Pemda DIY melalui Dinas Kebudayaan dan Balai Bahasa Provinsi DIY                                  | Terlaksana melalui kegiatan Revitalisasi Bahasa Daerah  | Terus berlangsung   |
| 9.         | Penyelenggaraan Uji Kemahiran Bahasa Jawa (UKBJ) atau matrikulasi Bahasa Jawa dilaksanakan sebagai sarana uji untuk mengukur kemahiran berbahasa Jawa, baik lisan maupun tulis.                                  | Telah dilaksanakan tahapan penyelenggaraan UKBJ melalui penyusunan korpus data oleh Pemda DIY, Balai Bahasa, UGM, dan UNY | Melakukan pengumpulan korpus data   | Terus berlangsung sejak 2024  |
| 10.        | Penyelenggaraan lomba berjenjang/festival/olimpiade bahasa, sastra, dan aksara Jawa dilaksanakan untuk satuan pendidikan dan umum.   | Telah dilaksanakan oleh Pemda DIY melalui Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan serta Balai Bahasa Provinsi DIY           | Terlaksana melalui tahapan Revitalisasi Bahasa Daerah   | Terus berlangsung   |
| 11.        | Strategi alih wahana dilaksanakan dengan mengalihwahanakan naskah-naskah Jawa (cerita Panji, dongeng-dongeng Jawa, dll.)   | Telah dilaksanakan oleh Pemda DIY dan Balai Bahasa Provinsi DIY   | Terlaksana melalui digitalisasi manuskrip dan naskah kuno di perpustakaan bekerja sama dengan       | Masih berlangsung untuk manuskrip dan naskah kuno yang tersebar di masyarakat |

| No. | Kegiatan/<br>Rekomendasi  | Telah<br>dilaksanakan   | Jenis Kegiatan<br>Terkait (Program<br>Balai Bahasa DIY)   | Keterangan Program |
|-----|---|---|---|--------------------|
|     | ke dalam teks digital (digitalisasi)  |   | Perpusnas RI sejumlah 123 naskah (2024–2025)  |                    |
| 12. | Sistem informasi budaya Jawa sekurang-kurangnya menggunakan bahasa Jawa dan bahasa internasional (Inggris) dalam rangka <i>anjayeng bawana</i> , bukan sekadar situs laman ( <i>website</i> ), pangkalan data budaya Jawa/semacam PDDikti, atau aplikasi biasa, tetapi wujudnya lebih dari Siakad yang lazim digunakan di perguruan tinggi. | Sudah proses dilaksanakan oleh Pemda DIY                          | Menyusun Pedoman Penulisan Aksara Jawa Huruf Latin dan Pedoman Pemerayaan Istilah Jawa sebagai pedoman transliterasi aksara Jawa ke latin dalam rangka mendaftarkan aksara Jawa ke Pengelola Alamat Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) dan Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)j | Masih berlangsung  |
| 13. | Unsur kebudayaan Jawa lainnya perlu diangkat untuk <i>anjayeng budaya</i> (bahasa dan aksara Jawa).   | Telah dilaksanakan oleh Pemda DIY dan Balai Bahasa Provinsi DIY   | Terlaksana melalui Kamus Bahasa Jawa-Indonesia (KBJI) Daring  | Masih berlanjut    |
| 14. | Kongres menetapkan dan memutuskan Pedoman Umum Jawa Latin (PUJL). PUJL ini merupakan standar baku transliterasi Aksara Jawa ke Aksara Latin berstandar nasional yang bersifat praktis ( <i>simplified</i> ).  | Telah dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi DIY                 | Penyusun pedoman dalam rangka Revitalisasi Bahasa Daerah  | Belum finalisasi   |
| 15. | Komisi I merekomendasikan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan revisi Pedoman Umum Jawa Latin (PUJL).   | Sudah dilaksanakan pada 2024 dan dilanjutkan pada 2024 dan 2025   | Melaksanakan revisi Pedoman Umum Jawa Latin (PUJL)  | Belum finalisasi   |
| 16. | Komisi II merekomendasikan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung adanya pedoman  | Tata Bahasa Jawa berbahasa Jawa berhuruf latin disusun oleh Balai | Penyusun Tata Bahasa Jawa berbahasa Jawa berhuruf latin   | Masih berlangsung  |

| <b>No.</b> | <b>Kegiatan/<br/>Rekomendasi</b>  | <b>Telah<br/>dilaksanakan</b>   | <b>Jenis Kegiatan<br/>Terkait (Program<br/>Balai Bahasa DIY)</b>  | <b>Keterangan Program</b> |
|------------|---|---|---|---------------------------|
|            | umum penulisan aksara Jawa dengan mengadakan buku <i>Tata Bahasa Jawa</i> berbahasa Jawa berhuruf Latin dan buku <i>Tata Bahasa Jawa</i> berbahasa Jawa dan beraksara Jawa. | Bahasa, sedangkan Tata Bahasa Jawa beraksara Jawa disusun oleh Dinas Kebudayaan                 |   |                           |
| 17.        | Prosedur pelayanan atau permohonan dipermudah dan dipercepat.   | Sudah dilaksanakan  | Terlaksana melalui revisi POS dan pelayanan WA Siaga Bahasa   | Selesai                   |
| 18.        | Pelayanan jemput bola, tanpa menunggu permohonan pelanggan.   | Sudah dilaksanakan  | Terlaksana melalui program pembinaan dan pendampingan komunitas literasi/TBM, komunitas sastra, dan sekolah | Masih berlanjut           |
| 19.        | Penambahan ahli bahasa di Balai Bahasa Provinsi DIY (termasuk Filolog).   | Sedang dilaksanakan   | Penambahan SDM Penyuluhan Bahasa melalui perekrutan CPNS  | Selesai                   |
| 20.        | Produk layanan Balai Bahasa Provinsi DIY dikembangkan untuk melayani penerjemah tersumpah.  | Sedang dilaksanakan oleh Badan Bahasa   | Penatausahaan pengadministrasian usulan melalui kepegawaian dan tata laksana                                | Sedang berlangsung        |
| 21.        | Pelatihan aksara Jawa tingkat provinsi.   | Sudah dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi DIY dengan Pemda DIY                              | Melalui program Bimbingan Teknis Guru Utama   | Masih berlanjut           |
| 22.        | Pembinaan komunitas literasi dipertahankan.   | Sedang dilaksanakan bekerja sama dengan Pemda DIY melalui Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan | Melalui program Pembinaan Komunitas dan Revitalisasi Bahasa Daerah  | Terus berlangsung         |
| 23.        | Peningkatan keterbukaan informasi dilaksanakan secara masif berkaitan dengan program yang dilaksanakan  | Sudah dilaksanakan  | Melaksanakan penyampaian informasi program Balai Bahasa secara  | Terus berlangsung         |

| <b>No.</b> | <b>Kegiatan/<br/>Rekomendasi</b>   | <b>Telah<br/>dilaksanakan</b> | <b>Jenis Kegiatan<br/>Terkait (Program<br/>Balai Bahasa DIY)</b> | <b>Keterangan Program</b> |
|------------|------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
|            | oleh Balai Bahasa Provinsi<br>DIY. |                               | masif melalui media<br>sosial dan tim Humas                      |                           |